

**DIALEKTIKA PUBLIK**  
**JURNAL ADMINISTRASI NEGARA**  
**UNIVERSITAS PUTERA BATAM**

**VOL. 7 No. 1 (2023)**

**ISSN (Print) 2528-3332**  
**ISSN (Online) 2621-2218**

**Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan  
Dan Anak Kota Tanjung Pinang Dalam Menangani Kasus  
Pelecehan Seksual Terhadap Anak - *Sri Ambar Rinah***

**Peranan Jasa Raharja Memberikan Pelayanan Santunan Asuransi  
Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Batam- *Betty Krisdayanti Sihombing*  
*Timbul Dampak***

**Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kota Batam  
*Duwi Susilawati<sup>2</sup> Etika Khairina***

**Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan  
Dan Pengemis Kota Batam - *Ayu Wulandari***

**Implementasi Dan Dampak Kebijakan Pemerintah Dalam  
Pengelolaan Serta Penanggulangan Sampah Plastik Di Kota Batam  
- *Wilda Mukhalladun Waruwu, Etika Khairina***

## Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Tanjungpinang Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak

<sup>1</sup>Sri Ambar Rinah

<sup>1</sup>Prodi Administrasi Publik STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang

Correspondance: [sriambarrinah@stisipolrajahaji.ac.id](mailto:sriambarrinah@stisipolrajahaji.ac.id)

### INFORMASI ARTIKEL

#### Sejarah Artikel

Diterima Redaksi: 26 Mei 2023

Revisi Akhir: 3 Juni 2023

Diterbitkan Online: 8 Juli 2023

#### KEYWORDS

Role, Regional Technical unit, Sexual Violence.

#### KORESPONDENSI

No HP:

E-mail: [sriambarrinah@stisipolrajahaji.ac.id](mailto:sriambarrinah@stisipolrajahaji.ac.id)

### Abstracts

Cases of sexual violence or sexual abuse against children are increasing in the city of Tanjungpinang. the Government of Tanjungpinang City established a Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA). The purpose of this research is to find out the role of UPTD PPA Tanjungpinang City in handling cases of sexual abuse of children. This research method is descriptive with a qualitative approach. The population in this study were staff working at UPTD PPA Tanjungpinang City. The informants in this study were determined by purposive sampling, namely the UPTD PPA staff who played a role in handling cases of sexual abuse in children, namely psychologists and lawyers, members of the Police, employees of the Ahmad Tabib Hospital and employees of the Tanjungpinang City Social Service. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentary studies. The results of this study are that the UPTD PPA has carried out its role well in handling cases of sexual abuse of children in accordance with their duties and functions even though the UPTD PPA does not have appropriate fields to deal with victims and there are obstacles in handling victim cases. This is shown by the increasing number of cases of violence against women and children being reported to the UPTD PPA.

### Abstrak

Kasus Kekerasan seksual atau pelecehan seksual terhadap anak semakin meningkat di kota Tanjungpinang. Pemerintah Kota Tanjungpinang membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Peran UPTD PPA Kota Tanjungpinang Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak. Metode penelitian ini ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini ialah para staf yang bekerja di UPTD PPA Kota Tanjungpinang. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling yaitu staf UPTD PPA yang berperan dalam menangani kasus pelecehan seksual pada anak, yaitu Psikolog dan Pengacara, anggota Polres, pegawai RSUD Ahmad Tabib dan pegawai Dinas Sosial Kota Tanjungpinang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa UPTD PPA telah menjalankan perannya dengan baik dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak sesuai dengan tupoksi mereka meskipun UPTD PPA tidak memiliki bidang-bidang yang sesuai untuk menangani korban serta terdapat kendala-kendala dalam menangani kasus korban. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang terlaporkan ke UPTD PPA



## Pendahuluan

Kekerasan seksual dapat dikatakan sebagai salah satu kekerasan fisik yang merupakan salah satu tindakan kriminal, dimana pelaku tindak kekerasan seksual ini melakukan hal tersebut untuk memuaskan hasrat pribadinya secara paksa yang dimana akan mengakibatkan korbannya merasa tertekan, marah, benci dan sebagainya yang menimbulkan dampak negatif bagi korban yang mengalami kekerasan seksual tersebut. (Fauziah Al haq, 2017) mengatakan bahwa suatu bentuk pelecehan anak di mana remaja atau orang dewasa yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual dikenal sebagai pelecehan seksual anak.

Menuntut atau memaksa anak untuk melakukan aktivitas seksual adalah salah satu bentuk pelecehan seksual. Sebenarnya ada banyak macam bentuk dari kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu sendiri, (Sukiman, 2017), sebagai contoh, yaitu kekerasan seksual terhadap anak dalam dunia nyata yaitu : Menyentuh dan meraba bagian tubuh sensitif anak, Memaksa dan meyakinkan anak untuk menunjukkan bagian tubuhnya, Memaksa berhubungan seks, Menunjukkan kemaluan kepada anak.

Kasus Kekerasan seksual atau pelecehan seksual terhadap anak semakin menggemparkan dan meningkat di kota Tanjungpinang, hal ini dapat diketahui dari adanya informasi tentang pelecehan seksual terhadap anak, seperti: Polda Kepulauan Riau (Kepri), mengamankan 1 pelaku predator pada 10 orang anak di bawah umur yang mana korban bukan hanya anak perempuan tetapi ada juga anak laki-laki, dan para korban ini masih dalam usia rata-rata 6 sampai 14 tahun. (Antara, 2021). Demikian halnya Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kepulauan Riau mencatat 106 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi sepanjang semester I Tahun 2022. (Nuel, 2022)

Untuk mengatasi tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Tanjungpinang, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tanjungpinang mempunyai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Dasar pembentukan UPTD PPA terdapat pada Permendagri No 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

**Tabel 1. Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Dalam Kasus Pelecehan Seksual 2019-2021**

No	Bulan	Pelecehan Seksual 2019				Pelecehan Seksual 2020				Pelecehan Seksual 2021			
		Anak Sebagai Korban		Anak Sebagai Pelaku		Anak Sebagai Korban		Anak Sebagai Pelaku		Anak Sebagai Korban		Anak Sebagai Pelaku	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	2	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
5	Mei	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
6	Juni	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	1	-
7	Juli	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
8	Agustus	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
9	September	1	3	-	-	1	6	-	-	-	9	1	-
10	Oktober	1	-	3	-	-	1	-	-	1	1	-	-
11	November	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7	6	-
12	Desember	-	1	-	-	-	2	-	-	1	9	1	-
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>13</b>	<b>-</b>

Sumber : UPTD PPA Kota Tanjungpinang

Dari tabel di atas, terlihat bahwa kasus pelecehan seksual pada anak setiap tahunnya semakin meningkat. Terlihat pada tahun 2019 kasus pelecehan terhadap anak terdapat 2 korban laki-laki dan 13 korban perempuan serta anak sebagai pelaku laki-laki berjumlah 4 orang. Pada tahun 2020 kasus pelecehan seksual

kepada anak terdapat 2 korban laki-laki, 14 korban perempuan, dan anak sebagai pelaku laki-laki berjumlah 1 orang. Pada tahun 2021 kasus pelecehan seksual kepada anak terdapat 2 korban laki-laki, 40 korban perempuan, dan anak sebagai pelaku laki-laki berjumlah 13 orang.

UPTD PPA juga memiliki peran dalam pendampingan korban, yang dimana pelayanan pendampingan ini merupakan proses pelaksanaan pendampingan korban untuk melakukan hal-hal yang di rekomendasikan serta memantau perkembangannya. Lalu, UPTD PPA memiliki peran dalam Pendampingan Hukum ialah membantu dan menangani korban kekerasan pada perempuan dan anak melalui proses kepolisian dan pengadilan, serta memberikan bantuan mediasi untuk hal-hal yang tidak dapat diselesaikan melalui sistem hukum.

(Fury, 2020) Disamping itu, dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual pasal 39, dinyatakan bahwa pemerintah juga memberikan beberapa layanan pendampingan korban kekerasan seksual, yaitu: layanan pengaduan; b. layanan kesehatan; c. layanan penguatan psikologis; d. layanan psikososial dan rehabilitasi sosial; e. layanan Pendampingan hukum; dan f. layanan pemberdayaan ekonomi.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa, proses pengaduan yang di lakukan oleh seorang ibu yang putranya mengalami kasus kekerasan, telah di layani dengan baik oleh salah satu pegawai yang berada di UPTD PPA.

Diketahui bahwa pelapor dan terlapor telah melakukan mediasi akan tetapi orang tua murid yang melakukan tindak kekerasan menolak untuk meminta maaf sehingga masalah ini akan di bawa ke ranah hukum dengan bantuan pihak UPTD PPA. Mengacu pada hasil observasi penelitian di atas, sesuai dengan edaran yang ada UPTD PPA mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika mereka melihat dan mengetahui tentang ada nya kejahatan kepada perempuan dan anak di sekitar lingkungan, atau

jika mereka mengalami kekerasan itu sendiri, untuk segera melapor ke UPTD PPA. Bahkan, Kepala DP3PM Kota Tanjungpinang, juga telah menginformasikan bahwa pelayanan pengaduan terhadap adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu via Whatsapp atau telepon langsung ke hotline UPTD PPA di nomor 082286719448, online melalui aplikasi cek dare, atau pelapor bisa datang langsung ke UPTD PPA. (Tri Chairani, 2021)

### **Kajian Teori**

Dari hasil penelitian terdahulu yang di lakukan oleh (Fatiya Nurhaliza, 2022) ,disimpulkan bahwa UPTD PPA Aceh berperan mendampingi dan menangani korban pemerkosaan dalam proses di kepolisian sampai tingkat ke pengadilan agar terpenuhi hak-haknya dalam mendapatkan keadilan. Namun dalam menjalankan peran tersebut UPTD mengalami beberapa kendala terkait dengan fasilitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan, anggaran UPTD yang terbatas.

Kemudian belum tersedianya layanan rumah aman. Pendampingan hukum yang dilakukan UPTD PPA Aceh pada anak korban pemerkosaan dalam perkara putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth belum efektif. Hal ini dikarenakan anak dibiarkan begitu saja tanpa adanya advokasi pendampingan yang diberikan pada korban. UPTD juga tidak memberikan perlindungan terhadap anak dengan ditempatkan ditempat yang aman (rumah aman) agar tidak terjadinya intervensi dari pihak keluarga yang dapat mengancam anak secara psikis.

Dengan dasar latar belakang dan fenomena yang ada, dan melihat dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan seksual pada anak, seperti trauma berat serta dapat berefek pada kondisi psikologisnya yang akan terganggu, maka peneliti dapat mengatakan bahwa penelitian ini sangat penting dilakukan, mengingat peran UPTD PPA dalam mengatasi

hal ini sangatlah penting. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran UPTD PPA Kota Tanjungpinang Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak.

### **Peran Pemerintah**

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut "role" yang definisinya adalah "person's task or duty in undertaking". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". (Torang, 2014). Peran merupakan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Menurut Biddle dan Thommas yang dikutip oleh (Sarlito Wirawan Sarwono, 2017) membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
- d. Kaitan orang dengan perilaku

### **Orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.**

Beberapa istilah yang digunakan dalam teori peran untuk menggambarkan orang. Ada dua jenis/golongan orang yang berpartisipasi dalam interaksi sosial sebagai berikut :

- a. Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu.
- b. Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.

Individu atau kelompok individu dapat berperan sebagai aktor dan target. Paduan

suara (aktor) dan pendengar (target) membentuk hubungan antar kelompok dan kelompok, misalnya. Biasanya, istilah person, ego, atau self digunakan sebagai pengganti aktor. Sementara istilah alter-ego, ego, atau non self mengambil tempat sebagai target,

### **Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut**

Biddle dan Thomas yang dikutip oleh (Sarlito Wirawan Sarwono, 2017) membagi lima indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran sebagai berikut :

- a. Harapan tentang peran (expectation)

Harapan tentang peran ialah harapan orang lain tentang perilaku yang pantas yang harus ditunjukkan oleh seseorang dalam peran tertentu. Harapan mengenai perilaku ini dapat berasal dari suatu individu, harapan dari sekelompok orang, atau dari masyarakat umum.

- b. Norma (norm)

Secord dan Backman berpendapat bahwa, norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Secord dan Backman membagi jenis-jenis harapan sebagai berikut :

- c. Harapan yang bersifat meramalkan (anticipatory), yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi. Harapan normatif (role expectation), yaitu keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan normatif ini dibagi lagi ke dalam dua jenis: Harapan yang terselubung (covert), yaitu harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan. Harapan yang terbuka (overt), yaitu harapan yang diucapkan.

Harapan jenis ini dinamai tuntutan peran (role demand). Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.

a. Wujud perilaku dalam peran (performance)

Aktor mewujudkan peran melalui tindakan mereka. Perilaku yang ditampilkan dalam peran ini berbeda dan bervariasi dari aktor ke aktor. Variasi dalam teori peran ini normal dan tidak memiliki batas. Teori peran cenderung mengklasifikasikan istilah-istilahnya sesuai dengan sifat asal perilaku dan tujuannya (motivasi) daripada menurut perilaku tertentu. Akibatnya, jenis perilaku peran dapat dipecah menjadi berbagai kategori, seperti hasil pekerjaan, sekolah, olahraga, pendisiplinan anak, menjaga ketertiban, dan sebagainya. Terlepas dari bagaimana tujuan atau hasil itu dicapai, peran dilihat dari tujuan dasar atau hasil akhirnya.

b. Penilaian (evaluation) dan sanksi (sanction)

Jika di kaitkan dengan peran, sanksi dan penilaian agak sulit dipisahkan. Biddle dan Thomas dikutip oleh (Sarlito Wirawan Sarwono, 2017) mengatakan bahwa antara sanksi dan penilaian didasarkan pada harapan orang lain tentang norma. Menurut teori peran, kesan positif atau negatif masyarakat tentang perilaku seorang aktor, dikenal sebagai penilaian peran yang di nilai berdasarkan norma yang berlaku sesuai perilaku aktor tersebut. Sedangkan sanksi yang di maksud ialah upaya aktor untuk mempertahankan nilai positif atau mengubah cara peran dimainkan

sehingga yang tadinya dianggap negatif menjadi positif.

Menurut Biddle dan Thomas yang di kutip oleh Sarwono (2013:215), Sanksi dan penilaian dapat berasal dari dalam diri sendiri atau dari orang lain (eksternal). Jika penilaian dan hukuman berasal dari luar, hal ini menunjukkan bahwa penilaian dan hukuman peran dipengaruhi oleh tindakan orang lain. Jika sanksi dan penilaian berasal dari dalam, maka pelaku sendiri memberikan nilai dan hukuman berdasar kan pemahaman mereka tentang norma dan harapan sosial. Sanksi dan penilaian eksternal lebih sering berlaku pada peran dan norma yang kurang penting bagi individu, sedangkan Sanksi dan penilaian internal biasanya terjadi dalam peran yang di anggap penting dan signifikan oleh individu yang bersangkutan.

Kemudian Biddle dan Thomas yang di kutip oleh (Sarlito Wirawan Sarwono, 2017). sanksi dan penilaian internal disebut tertutup (covert), Sanksi dan penilaian eksternal disebut juga penilaian dan sanksi terbuka (overt). Ini karena sanksi dan penilaian di dasarkan pada harapan tentang norma yang muncul dari orang lain yang di komunikasi kan melalui perilaku yang terbuka (overt). Seseorang tidak dapat menerima sanksi dan penilaian atas perilakunya kecuali dia membuat pernyataan melalui perilaku terbuka.

### **Kedudukan dan perilaku orang dalam peran**

Kedudukan ialah sekelompok orang yang diakui berbeda dari kelompok lain karena karakteristik dan sifat yang mereka miliki bersama, cara mereka bertindak, perilaku yang mereka perbuay, dan bagaimana orang lain bereaksi terhadap mereka bersama. Ada 3 faktor yang mendasari penempatan seseorang dalam posisi tertentu, yaitu:

1. Sifat- sifat yang di miliki bersama seperti jenis kelamin, suku bangsa,

usia atau ketiga sifat itu sekaligus. Semakin banyak sifat yang dijadikan dasar kategori kedudukan, semakin sedikit orang yang dapat ditempatkan dalam kedudukan itu.

2. Perilaku yang sama seperti penjahat (karena perilaku jahat), olahragawan, atau pemimpin. Perilaku ini dapat diperinci lagi sehingga kita memperoleh kedudukan yang lebih terbatas. Selain itu, pengolongan kedudukan berdasarkan perilaku ini dapat bersilang dengan pengolongan berdasarkan sifat, sehingga membuat kedudukan semakin eksklusif.
3. Reaksi orang terhadap mereka.

### **kaitan orang dan perilaku**

Mengacu pada Biddle dan Thomas yang dikutip oleh (Sarlito Wirawan Sarwono, 2017) mengemukakan bahwa kaitan (hubungan) yang dapat dibuktikan atau tidak dan dapat diperkirakan kekuatannya ialah kaitan antara orang dengan perilaku dan perilaku dengan perilaku. Dalam teori peran, kaitan antara orang (individu) dengan orang jarang dibahas. Kriteria untuk menetapkan kaitan-kaitan tersebut di atas diantaranya yaitu :

#### a) Kriteria Kesamaan

1. Diferensiasi (differentiation), yaitu seperti norma bagi orang yang bukan merupakan bagian dari suatu kelompok sosial tertentu sangat berbeda dengan norma bagi orang yang menjadi bagian kelompok tertentu. Hubungan yang terjalin antara dua norma itu disebut diferensiasi, yang ditandai dengan ketimpangan dan ketidaksetaraan.

2. Konsensus (consensus), ialah kaitan antara tindakan/prilaku yang menunjukkan kesepakatan mengenai masalah tertentu. Hal yang disepakati bersama itu biasanya berupa sanksi, deskripsi, penilaian, dan preskripsi. Bentuk konsensus sendiri bisa terbuka (overt) atau tertutup (covert).

3. Konflik peran, berdasarkan adanya disensus yang terpolarisasi yang menyangkut peran, yaitu suatu hal yang sangat menarik perhatian ahli-ahli psikologi sosial dan sosiologi. Konflik peran ada dua jenis, yaitu konflik antar peran (inter-role conflict) yang disebabkan oleh ketidakjelasan antara perilaku yang diharapkan dari satu posisi dengan posisi lainnya pada satu aktor, dan konflik dalam peran (intra-role conflict) yang disebabkan oleh tidak jelasnya perilaku yang diharapkan dari suatu posisi tertentu.

4. Keseragaman, yaitu kaitan dua orang lebih memiliki peran yang sama.

5. Spesialisasi, yaitu kaitan orang dan perilaku dalam satu kelompok dibedakan menurut posisi dan peran yang diharapkan dari mereka.

6. Konsistensi, yaitu kaitan antara perilaku dengan perilaku sebelumnya yang saling menyambung.

### **Kekerasan Seksual**

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014) kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran,

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. (WHO, 2017)

### **Jenis Kekerasan Seksual**

Menurut WHO (2017) kekerasan seksual dapat berupa tindakan/ Serangan seksual berupa pemerkosaan (termasuk pemerkosaan oleh warga negara asing, dan pemerkosaan dalam konflik bersenjata).

sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa. Pelecehan seksual secara mental atau fisik menyebut seseorang dengan sebutan berkonteks seksual, membuat lelucon dengan konteks seksual. Menyebarkan video atau foto yang mengandung konten seksual tanpa izin, memaksa seseorang terlibat dalam pornografi. Tindakan penuntutan/pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang atau penebusan/persyaratan mendapatkan sesuatu dengan kegiatan seksual. Pernikahan secara paksa. Melarang seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi ataupun alat untuk mencegah penyakit menular seksual. Aborsi paksa. Kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan. Pelacuran dan eksploitasi komersial seksual.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut (Bogdan dan Taylor, 2010), “penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.” Berdasarkan ruang lingkup

permasalahan yang di teliti, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini ialah para staf yang bekerja di UPTD PPA Kota Tanjungpinang. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling yaitu staf UPTD PPA yang berperan dalam menangani kasus pelecehan seksual pada anak, yaitu Psikolog dan Pengacara, anggota Polres, pegawai RSUD Ahmad Tabib dan pegawai Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, berupa data Peran UPTD PPA Kota Tanjungpinang Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak, data anak yang mengalami kekerasan seksual, dan penanganan yang dilakukan oleh UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tanjungpinang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentatif. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Peran unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) Kota Tanjungpinang dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah salah satu organisasi yang bertugas melindungi anak perempuan dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Peran UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat melalui beberapa indikator berikut ini:

#### **a. Orang Yang Mengambil Bagian Dalam Interaksi.**

Orang yang mengambil bagian dalam interaksi, berkaitan dengan melihat apa yang dilakukan UPTD PPA sebagai aktor yang berperan menangani masalah pelecehan seksual terhadap anak. Dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa petugas UPTD PPA kota Tanjungpinang menjalankan tugas nya

sesuai dengan tupoksi mereka yaitu melakukan pendampingan dan penanganan terhadap korban. Para petugas UPTD PPA Kota Tanjungpinang semua ikut terlibat menjalankan perannya dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak, dikarenakan UPTD PPA Kota Tanjungpinang tidak memiliki bagian atau bidang, akan tetapi semua petugas yang ada di UPTD PPA Kota Tanjungpinang telah mendapatkan pelatihan tentang manajemen kasus agar mereka lebih memahami bagaimana cara menyikapi dan menangani kasus yang terjadi terhadap korban yang melapor ke UPTD PPA.

#### **b. Perilaku Yang Muncul Dalam Interaksi.**

Perilaku yang muncul dalam interaksi, yang dimana pada indikator ini menjelaskan bagaimana sikap atau respon UPTD PPA terhadap korban yang mengalami kekerasan/pelecehan seksual. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perilaku atau sikap yang ditunjukkan oleh UPTD PPA Kota Tanjungpinang dalam menangani korban dilakukan dengan sigap serta memberikan respon yang baik terhadap korban yang melapor.

Melalui pengamatan langsung selama melakukan penilitaian pada UPTD PPA, peneliti pernah mengamati secara langsung bagaimana sikap dari UPTD PPA dalam memberikan respon terhadap korban yang melapor, Petugas UPTD PPA yang menerima laporan tersebut menanggapi korban secara baik dan perlahan dalam memperoleh jawaban dari korban yang melapor, UPTD PPA juga diketahui telah melakukan mediasi pada korban dan pelaku yang dimana dalam mediasi tersebut tidak membuahkan hasil sehingga UPTD PPA melakukan hal lain seperti menawarkan bantuan hukum kepada korban. Pegawai UPTD PPA dalam menerima laporan juga tidak memaksa korban untuk mengingat dan memburu-burui korban dalam memberikan penjelasan, mereka lakukan secara perlahan agar korban tidak merasa trauma dan mau terbuka serta bercerita kepada petugas tentang apa yang mereka alami.

#### **c. Kedudukan Dan Perilaku Orang Dalam Peran**

Kedudukan dan perilaku orang dalam peran, UPTD PPA yang menjadi aktor dalam menjalankan

perannya tentunya memiliki kedudukan/wewenang melakukan inovasi dalam menjalankan tugasnya untuk menangani korban kekerasan/pelecehan seksual. Dengan melihat apa saja rencana yang dilakukan UPTD PPA sebagai aktor yang menjalankan perannya dalam mengembangkan sistem pelayanan dan melihat dengan siapa saja UPTD PPA melakukan sinergi dalam melakukan penanganan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan UPTD PPA sebagai aktor dalam menangani kasus pelecehan seksual memiliki pengembangan pelayanan seperti adanya Molin Sigap atau Mobil Siap Dan Tanggap Perlindungan Perempuan Dan Anak. Mobil tersebut digunakan untuk menjemput atau mengantar para korban, di katakan bahwa mobil tersebut juga standby selama 24 jam.

Akan tetapi jika melakukan pengantaran atau penjemputan molin sigap tidak mengantar sampai kerumah dikarenakan pihak UPTD PPA sangat menjaga privasi dari korban dikarenakan jika ada korban yang mengalami masalah atau kasus pelecehan seksual merupakan masalah yang sensitive, sehingga privasi mereka pun harus dijaga dengan ketat.

UPTD PPA juga melakukan pengembangan media sosial agar memudahkan masyarakat dalam proses pengaduan. UPTD PPA juga memberikan informasi kepada kelurahan kecamatan dan RT/RW. UPTD PPA juga melakukan sinergi dalam menangani kasus pelecehan seksual dengan pihak kepolisian, pihak dinas sosial, dinas pendidikan, RSUD, RSUP, media dan LSM.

#### **d. Kaitan Orang Dan Perilaku**

Kaitan orang dan perilaku, yang dimana para petugas UPTD PPA sebagai pihak yang berperan dalam menangani kasus kekerasan/pelecehan seksual tentunya memiliki kaitan pada perilaku atau sikap mereka dalam menangani kasus, yang dimana perilaku atau sikap ini muncul ketika seseorang melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa UPTD PPA Kota Tanjungpinang

memiliki beberapa kendala, yang pertama yaitu mereka belum memiliki rumah aman, yang dimana rumah aman adalah tempat tinggal sementara bagi perempuan atau anak korban kekerasan atau pelecehan seksual yang membutuhkan perlindungan. Dikarenakan mereka belum memiliki rumah aman, maka anak yang membutuhkan perlindungan sementara ini di rujuk ke RSUP (Rumah Sakit Umum Provinsi).

Untuk kendala yang kedua yaitu dalam proses penanganan khususnya proses identifikasi kasus, terkadang terdapat kendala ketika korban melaporkan kejadian yang sudah lama terjadi, karena kejadian yang sudah lama berlalu, korban tidak bisa menceritakan secara detail mengenai kejadiannya, sehingga menghambat proses penyidikan baik bagi UPTD PPA atau pun penyidikan di kepolisian. Kendala selanjutnya adalah UPTD PPA kekurangan SDM, karena petugas yang ada di UPTD PPA Kota Tanjungpinang saat ini hanya berjumlah 7 orang saja.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Tanjungpinang Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak yang di lihat dari empat indikator yang penulis gunakan dapat di simpulkan bahwa UPTD PPA berperan dengan baik dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak sesuai dengan tupoksi mereka meskipun UPTD PPA tidak memiliki bidang-bidang yang sesuai untuk menangani korban serta terdapat kendala-kendala dalam menangani kasus korban.

## Referensi

### Website/Berita Online

Antara. (2021). Polisi Tangkap Predator Seksual 10 Anak Di Tanjungpinang. <https://nasional.tempo.co/read/1540369/polisi-tangkap-predator-seksual-10-anak-di-tanjungpinang>

Fauziah Al Haq. (2017). 7 Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia. <http://www.republika.co.id/berita/humaira/samara/13/08/01/mquqn1-10-hak-anak-indonesia->

Nuel. (2022). Miris, Pelecehan Seksual Dominasi Kasus Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kepri. <https://sijoritoday.com/2022/07/25/miris-pelecehan-seksual-dominasi-kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-kepri/>

Tri Chairani. (2021). Resmi Terbentuk, Uptd Ppa Tanjungpinang Siap Layani Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak. <https://www.tanjungpinangkota.go.id/berita/resmi-terbentuk-uptd-ppa-tanjungpinang->

Who. (2017). A Look At Child Abuse On The Global Level. Pbc. <https://www.pbc2019.org/protection-of-minors/child-abuse-on-the-global-level>

### Jurnal / Buku

Bogdan Dan Taylor. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Remadja Karya.

Fatiya Nurhaliza. (2022). Peran Uptd Ppa Aceh Dalam Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan.

Fury, L. V. (2020). Peran Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan. Fury, L.V.

Sarlito Wirawan Sarwono. (2017). Teori-Teori Psikologi Sosial. Rajawali Pers.

<sup>1</sup>Rinah,

Sukiman. (2017). Melindungi Anak Dari Kekerasan Seksual. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Torang, S. (2014). Organisasi Dan Manajemen(Perilaku, Struktur, Budaya, Dan Perubahan Organisasi. Alfabeta.

Peraturan/Undnag-Undang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (2014).

## Peranan Jasa Raharja Memberikan Pelayanan Santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Batam

<sup>1</sup> Betty krisdayanti sihombing <sup>2</sup>Timbul Dompok

[pb191010026@upbatam.ac.id](mailto:pb191010026@upbatam.ac.id) [Timbul.Dompok@Puterabatam.ac.id](mailto:Timbul.Dompok@Puterabatam.ac.id)

<sup>1,2</sup> Administrasi Publik Fakultas Sosila Humaniora Universitas Putera Batam

Correspondance: [pb191010026@upbatam.ac.id](mailto:pb191010026@upbatam.ac.id)

### INFORMASI ARTIKEL

#### Sejarah Artikel

Diterima Redaksi: 26 Mei 2023

Revisi Akhir: 3 Juni 2023

Diterbitkan Online: 8 Juli 2023

#### KEYWORDS

*Responsibilities and Roles, Traffic Accidents*

### KORESPONDENSI

No HP:

E-mail: [pb191010026@upbatam.ac.id](mailto:pb191010026@upbatam.ac.id)

### Abstracts

Developments in technology and science, especially in the field of roads and transportation, have both positive and negative impacts on people's behavior, such as increasing the risk of traffic accidents. Heirs of traffic accident victims who died and suffered minor and serious injuries need funds for funeral expenses and medical expenses. Therefore, Jasa Raharja has the responsibility to replace all those who played a role in the car accident. Jasa Raharja's claim process begins by filling out the form as best and as honestly as possible based on valid documents. This process takes at least one to two hours, or a full day, depending on the number of people filing claims at the same time. This study aims to determine the extent to which PT Jasa Raharja (Persero) has been running successfully and effectively to comply with Law no. 33 and 34 of 1964 in providing insurance payments for accident victims and passengers on bus lanes in Batam. This study combines the use of descriptive statistics with qualitative methods. Observation and interviews are the main methods of obtaining data, and documentation and literature research are other types of data collection.

### Abstrak

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang jalan dan transportasi memberikan dampak positif sekaligus negatif terhadap perilaku masyarakat, seperti meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas. Ahli waris korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dan luka ringan dan berat membutuhkan dana untuk biaya pemakaman serta biaya pengobatan. Oleh karena itu, Jasa Raharja memiliki tanggung jawab untuk mengganti semua yang berperan dalam kecelakaan mobil tersebut. Proses klaim Jasa Raharja diawali dengan mengisi formulir dengan sebaik dan sejujur mungkin berdasarkan dokumen yang sah. Proses ini memakan waktu setidaknya satu hingga dua jam, atau sehari penuh, tergantung pada jumlah orang yang mengajukan klaim pada waktu yang bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sejauh mana PT Jasa Raharja (Persero) telah berjalan dengan sukses dan efektif untuk mematuhi Undang-Undang No. 33 dan 34 tahun 1964 dalam memberikan pembayaran asuransi bagi korban kecelakaan dan penumpang di jalur bus di Batam, Penelitian ini memadukan penggunaan statistik deskriptif dengan metode kualitatif. Observasi dan wawancara adalah metode utama untuk memperoleh data, dan dokumentasi dan penelitian literatur adalah jenis lain dari pengumpulan data.

## Pendahuluan

Kegiatan manusia untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan yang beragam telah berkembang seiring dengan semakin cepatnya waktu. Kemampuan untuk bergerak adalah salah satu kebutuhan kita yang paling mendasar. Ketersediaan transportasi memudahkan individu untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Meningkatnya jumlah mobil, yang saat ini menunjukkan peningkatan permintaan transportasi, dapat digunakan untuk menunjukkan hal ini. Selain mempromosikan mobilitas manusia, transportasi sangat penting untuk mendorong ekspansi ekonomi.

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, percepatan laju pertumbuhan ekonomi, dan pesatnya pembangunan infrastruktur menjadi beberapa tanda pesatnya perkembangan Kota Batam. Salah satu kota di Indonesia dengan pertumbuhan penduduk tercepat adalah Kota Batam. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memproyeksikan 1.196.396 jiwa akan bermukim di Kota Batam pada tahun 2020 (BPS Batam, 2020). Jumlah penduduk diperkirakan akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang, mencapai sekitar 2,8 juta orang pada tahun 2037. Selain angka kelahiran kota yang meningkat setiap tahunnya, pertumbuhan penduduk yang pesat ini merupakan akibat perpindahan penduduk dari tempat lain ke Kota Batam untuk mencari pekerjaan. Beberapa penyebab, termasuk migrasi dari tempat tetangga ke Kota Batam untuk mencari pekerjaan serta peningkatan angka kelahiran di sana setiap tahun, menjadi penyebab pertumbuhan penduduk kota yang sangat cepat. Akibat pertumbuhan penduduk tersebut, semakin banyak kendaraan pribadi yang

melintas di jalan raya sehingga menyebabkan semakin tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Kota Batam.

Perluasan masalah lalu lintas berhubungan langsung dengan kemajuan transportasi. Pasal 1 UU 24 No. 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi ketika dua mobil atau lebih bertabrakan atau ketika kendaraan secara tidak sengaja dan tidak terduga bertemu dengan pengguna jalan lain. Korban atau kerugian akibat kecelakaan dapat berupa luka ringan, luka berat, kematian, atau kehilangan harta benda. Kondisi jalan, kondisi kendaraan, cuaca, kemacetan lalu lintas, kondisi pengemudi, pelanggaran, dan peningkatan jumlah mobil setiap hari merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan lalu lintas. Semua elemen tersebut berkontribusi terhadap peningkatan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Batam (Fazrijal, 2014).

Ekspansi transportasi telah menyebabkan lalu lintas meningkat dengan cepat. Lingkungan memiliki permintaan transportasi yang signifikan, baik untuk pergi bekerja maupun untuk keperluan lain. Di Kota Batam, sepeda motor menjadi moda transportasi andalan masyarakat setempat. Sepeda motor dipandang sebagai alternatif yang berguna, efektif, dan praktis untuk bentuk transportasi lain. Masyarakat masih memilih mengendarai sepeda motor karena sangat praktis. Pemerintah telah membuat undang-undang yang menawarkan pertanggungjawaban asuransi untuk melindungi korban kecelakaan. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan banyaknya kecelakaan yang terjadi di Kota Batam. Hal itu disebut dengan UU No. 33 Tahun 1964. Diperkirakan bahwa undang-undang ini akan membantu korban kecelakaan dan menawarkan perlindungan yang

diperlukan. PT Jasa Raharja, organisasi yang memberikan santunan ini, memiliki sistem dan prosedur pembayaran klaim yang diatur oleh perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, kecelakaan yang terjadi di dijalan raya adalah musibah yang tidak disengaja atau kejadian yang tiba-tiba dialami oleh seseorang di jalan dan melibatkan kendaraan bermotor atau pengguna jalan lain, hingga berakibat pada kerusakan, dan menyebabkan korban jiwa atau korban mengalami luka ringan maupun luka berat). KNKT menyelidiki berbagai musibah kendaraan bermotor yang sering terjadi, termasuk insiden tunggal (tabrakan, terbalik, dan kebakaran), peristiwa yang melibatkan dua pengemudi lain, kecelakaan kendaraan berurutan, musibah yang melibatkan transportasi umum, seperti bus dan kereta api, dan lain- lain. Menurut pedoman dalam Peraturan Ketua Dewan Keselamatan Transportasi Nasional, kecelakaan sepeda motor umum tertentu yang berdampak signifikan terhadap orang, sarana dan prasarana lalu lintas jalan juga harus diselidiki.

PT Jasa Raharja (Persero) diharapkan mampu memberikan jaminan keselamatan jalan kepada seluruh pengemudi dan juga dapat menyalurkan kembali kepada melalui dana asuransi pembayaran jasa raharja dalam menjalankan kegiatannya disamping sumbangan wajib dari pemilik atau pengusaha pindahan jalan dan penumpang angkutan umum.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis mengambil judul “Peranan Jasa Raharja Memberikan Pelayanan Santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Batam

### **Kajian Teori**

#### **Peran pemerintah**

Kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh pemerintah daerah.

Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi ketika seseorang menunaikan tugasnya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2004:243).

Suatu peran dikatakan telah terpenuhi jika seseorang dalam posisi atau status tertentu telah memenuhi persyaratannya.

#### **Konsep dalam Peran Pemerintah**

Jika seseorang hidup dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya, peran mereka merupakan komponen dinamis dari statusnya. Peran dan status tidak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung pada yang lain, begitu pula sebaliknya. dimana tidak ada pekerjaan tanpa peran atau peran tanpa jabatan. Mirip dengan cara pekerjaan didefinisikan, peran menekankan semua tugas yang dimainkan manusia dalam masyarakat, yang bergantung pada nilai-nilai masyarakat. Ini menunjukkan pekerjaannya memengaruhi apa yang dilakukan masyarakat sambil membentuk peluang yang diberikan masyarakat (Mondong, 2013).

#### **Konsep pelayanan**

Secara sederhana, kata "pelayanan" mengacu pada "melakukan sesuatu untuk orang lain". Gagasan tersebut dapat diungkapkan dengan kata-kata pelayanan, dan pelayanan seperti perawatan kesehatan, pendidikan, asuransi, perbankan, dan sebagainya, biasanya merupakan barang tidak berwujud yang diproduksi di sektor fisik atau industri. Yang dimaksud dengan “jasa” meliputi segala sesuatu yang diberikan kepada pihak lain ( mereka , kelompok) sebagai suatu jasa.

Menurut (Kotler Laksana, 2018) Setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu dianggap sebagai layanan.

Pelayanan adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang berlangsung berurutan yang dilaksanakan oleh seseorang, kelompok orang atau suatu organisasi dalam rangka membantu menyiapkan atau memenuhi kepentingan orang lain atau masyarakat luas (Dompak, 2018)

Santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas

<sup>1</sup>Sihombing, <sup>2</sup>Dompak

Santunan yaitu sejumlah uang yang diberikan suatu lembaga para korban atau ahli waris yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Menurut UU No 34 Tahun 1965, dana ganti rugi yaitu pembayaran kepada korban yang dikumpul dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Menurut Undang-Undang No 34 Tahun 1964 yang wajib mendapatkan santunan yaitu setiap orang selain angkutan jalan yang menjadi objek atau sasaran kecelakaan yang menggunakan angkutan jalan.

Semua orang yang ada di dalamnya pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan, termasuk saat mereka menjadi pengendara sepeda motor pribadi maupun penumpang kendaraan bermotor. Pelaksanaan UU No 33 dan 34 Tahun 1964 memuat sifat dan tujuan sosial, yaitu memberikan perlindungan risiko dasar kepada mereka yang menderita kerugian karena kecelakaan, dan tepat untuk membayar dana ganti rugi kepada korban kecelakaan atau ahli warisnya. Ganti rugi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada sasaran kecelakaan atau ahli warisnya untuk mengumpulkan iuran kontribusi wajib untuk dana kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang jalan (SWKLLJ) menurut Undang-Undang No 34 Tahun 1964.

**Jenis-Jenis Santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas**

Korban kecelakaan yang wajib dalam mendapatkan pembayaran santunan yang dibagi menjadi beberapa jenis santunan yaitu:

- a. Santunan kepada korban kematian, uang santunan yang akan diberikan kepada ahli waris suatu korban yang sah, dan jika ada biaya perawatan atau pengobatan sebelum kematian dalam jumlah yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukan.
- b. Santunan terhadap korban luka-luka, suatu biaya yang akan (reimburse) adalah salah satu biaya perawatan yang diimplementasikan untuk fasilitas pada kesehatan agar dapat menyembuhkan luka diberikan kepada korban sebagai akibat langsung dari kecelakaan, hingga

365 hari. Jika lebih dari 365 hari, biaya perawatan atau pengobatan tidak ditanggung dan tidak bisa dikembalikan. terkecuali untuk pertanggung jawaban biaya operasi pelepasan pen, serew yang ditentukan.

c. Santunan bagi korban cacat tetap, apabila korban menderita cacat tetap dan biaya pengobatan sebelumnya. Besaran dana Cacat Tetap dihitung dalam persentase cacat tetap sesuai ketentuan yang telah ada.

d. Santunan penguburan, santunan ini untuk mereka yang meninggal tetapi tidak memiliki ahli waris.

Tabel 1

Sifat Cidera	UU No. 33 Tahun 1964 dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 15/PMK.010/2017 Tgl 13 Feb 2017	UU NO. 34 Tahun 1964 dan, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 16/PMK.010/ 2017 Tgl 13 Feb 2017	
	Penumpang Umum di Darat dan Laut	Penumpang Umum di Pesawat Udara	Lalu Lintas Jalan
Meninggal	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Luka-Luka	20.000.000	25.000.000	20.000.000
Cacat Tetap	50.000.000	50.000.000	50.000.000
P3k	1.000.000	1000.000	1.000.000
Ambulance	500.000	500.000	500.000
Penguburan	50.000.000	4.000.000	4.000.000

Besaran dana santunan PT Jasa Raharja kepada setiap korban kecelakaan sebelumnya atau ahli waris korban.

**Metode Penelitian**

Metode deskriptif digunakan dalam data kualitatif penelitian ini (Sujarweni, 2021). Pendekatan penelitian kualitatif adalah salah satu penelitian yang menggunakan prinsip-prinsip penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif tentang tulisan, ucapan, dan perilaku pengguna Penelitian kualitatif diartikan dalam memberikan penjelasan menyeluruh tentang perilaku verbal, nonverbal, atau disaksikan orang, masyarakat, dan lembaga sosial. Penelitian ini dilaksanakan langsung di PT Jasa

<sup>1</sup>Sihombing, <sup>2</sup>Dompak

Raharja Kota Batam. Pada penelitian ini maka dilakukan wawancara kepada karyawan yang ada dibagian santunan dan pelayanan. Tak hanya karyawan saja yang menjadi informan pada penelitian ini beberapa klaimen juga masuk wawancara untuk mengetahui apa saja kendala yang mereka alami ketika hendak melakukan klaimen.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Pola Manajemen Risiko Kecelakaan Lalu Lintas dan Masalah Implementasinya. Tujuan utama dari hazard para eksekutif adalah biasanya terkait dengan cara mencegah atau berpotensi mengurangi jumlah kecelakaan dan keseriusannya, seperti Ini menunjukkan bahwa semua dari rencana pengurangan risiko kecelakaan itu adalah latihan integral, bukan pilihan lain pilihan, ditegaskan (Cardoso, 2005).

Dengan demikian, semua variabel yang mempengaruhi risiko kecelakaan tidak hanya harus tercakup dalam substansi materi masing-masing program tetapi juga harus saling terkait dan terintegrasi. Berdasarkan temuan tersebut di atas, yaitu bahwa risiko kecelakaan adalah fungsi dari faktor risiko, risiko pemicu dan variabel deskriptifnya, secara berurutan, untuk mengembangkan jalan yang lebih aman perlu diintegrasikan semua variabel terkait ke dalam setiap risiko kecelakaan.

Namun, karena indikator risiko beragam karena untuk substansinya, perlu untuk menerapkan ini kerangka konseptual ke dalam keselamatan jalan local kebijakan secara konsisten. Selain itu, untuk mengakomodasi semua variabel yang dirasakan bahwa model jarak pandang berhenti (SSD) adalah model yang withering tepat yang dapat digunakan untuk mewakili efek dari faktor risiko seperti halnya perilaku mengebut, sistem pengereman, kemampuan akselerasi, kondisi jalan, pemicu risiko persepsi pengendara, motivasi, sikap, kemampuan pengereman dan kontrol kemudi.

#### **a. Peranan PT Jasa Raharja (Persero)**

#### **dalam memberikan santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan.**

Melalui dua program asuransi sosial, PT Jasa Raharja (Persero) berperan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan perlindungan paling mendasar kepada masyarakat. Program pertama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang Wajib adalah Asuransi Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum. Penumpang yang mengalami kecelakaan saat menggunakan angkutan umum dilindungi oleh program ini. Asuransi Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga merupakan program kedua yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Melalui program ini, pihak ketiga yang dirugikan akibat kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor terlindungi. Dengan dua skema asuransi tersebut, PT Jasa Raharja berharap dapat melindungi masyarakat sekitar dan mengurangi beban keuangan (Fitri & Kurniawati, 2021).

Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), PT Jasa Raharja (Persero), selain menjalankan tanggung jawab utamanya memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas, juga berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan bantuan inisiatif ini, pemilik usaha kecil dan menengah dapat memperoleh dukungan finansial untuk pertumbuhan lingkungan. PT Jasa Raharja (Persero) bertugas memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas selama kurun waktu dua tahun, dari tahun 2017 hingga 2018. Untuk memberikan santunan kepada 2.070 korban kecelakaan, salah satu anak perusahaannya Cabang Palu, telah memberikan Rp. 31.473.241.496. Sesuai dengan jenis jaminan dan beratnya kerugian yang diderita penerima, ganti rugi ini termasuk membayar klaim.

<sup>1</sup>Sihombing, <sup>2</sup>Dompak

**b. Hambatan yang dihadapi PT Jasa Raharja (Persero) dalam memberikan santunan kepada korban atau ahli warisnya.**

**a. Kendala Internal**

Permasalahan yang terjadi dalam pengoperasian perusahaan di PT Jasa Raharja (Persero) sangat erat kaitannya dengan sistem administrasi kepegawaian dan keuangan. Dalam hal penjangkauan, distribusi pembayaran, layanan penebusan, pembatalan iuran yang diperlukan, dan layanan keamanan seperti memasang tanda peringatan, terdapat sejumlah tantangan. Ada batasan, keuntungan, dan kerugian dalam situasi ini di dalam perusahaan itu sendiri. Hal itu terlihat dari sedikitnya rambu peringatan yang dipasang PT Jasa Raharja. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen bisnis dalam situasi ini, sistem administrasi harus dievaluasi dan diperbaiki. Sosialisasi perlu ditingkatkan agar semua pihak dapat memahami dan mengikuti protokol terkait.

PT Jasa Raharja (Persero) memiliki beberapa tantangan dalam hal distribusi santunan selama proses pembayaran dan pelunasan. Sangat penting bagi PT Jasa Raharja (Persero) untuk menunjukkan integritas dan ketulusan dalam menawarkan layanan sebagai organisasi asuransi sosial. Masalah administrasi dan keuangan di PT Jasa Raharja (Persero) cabang Batam, bagaimanapun, membatasi cara pembayaran kepada korban kecelakaan. Penyaluran pembayaran santunan Jasa Raharja kerap menemui kendala. Ada kendala administratif dalam tata cara pengalokasian uang santunan, mulai dari cara polisi menangani berkas perkara hingga prosedur di Jasa Raharja itu sendiri. Hal ini menimbulkan kesan bahwa prosedur klaim asuransi tidak efisien.

Wajib sesuai UU No. 33 dan 34 tahun 1964 menjadi salah satu persoalan yang dirasakan masyarakat. Anggapan tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan dan diinginkan masyarakat dari sebuah perusahaan yang berusaha menjadi perusahaan terdepan dalam industri asuransi

dengan fokus mendirikan asuransi sosial dan program asuransi wajib yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

Perlu mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini, termasuk meningkatkan kolaborasi dan komunikasi staf, membangun penjangkauan terpadu dan rutin, dan meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan uang yang terkumpul. Dengan demikian, PT Jasa Raharja (Persero) dapat meningkatkan kinerja, merebut kepercayaan masyarakat, dan mencapai tujuannya sebagai usaha yang mengutamakan pelayanan prima dan kebutuhan masyarakat sekitar.

Banyak keluhan telah dibuat tentang layanan yang tidak memenuhi standar masyarakat. Korban kecelakaan harus mendapatkan bantuan yang jelas dan tidak terhalang, dan insan PT Jasa Raharja harus memberikan dukungan tulus untuk membantu korban mencapai tujuan dan menjalankan misi PT Jasa Raharja. Sebagai lembaga asuransi sosial, PT Jasa Raharja (Persero) harus ikhlas dan peduli terhadap penderitaan masyarakat, khususnya korban kecelakaan dan ahli warisnya, dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya. Agar pengumpulan iuran dan donasi yang dibutuhkan mencukupi, penting juga untuk memerhatikannya.

Namun evaluasi terhadap komponen mental dan kinerja pegawai PT Jasa Raharja (Persero) sama pentingnya dengan aspek keuangan. Peninjauan menyeluruh harus mempertimbangkan latar belakang, jabatan, pendidikan, serta tugas dan tanggung jawab personel. PT Jasa Raharja (Persero) dapat meningkatkan layanan dan memenuhi tujuan sosialnya dengan lebih baik dengan melakukan tinjauan menyeluruh terhadap kinerja karyawan dan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Prinsip utama dalam memberikan pelayanan kepada korban kecelakaan dan ahli warisnya adalah ketulusan, kepedulian, dan profesionalisme. Perselisihan karyawan di PT Jasa Raharja (Persero) berdampak pada anggaran operasional. Misalnya, adanya

<sup>1</sup>Sihombing, <sup>2</sup>Dompak

keterbatasan dan kurangnya kerjasama antar pekerja dalam menjalankan operasi dan menggalakkan pencabutan iuran wajib bagi operator angkutan yang tidak layak serta sosialisasi Jasa Raharja tentang keselamatan jalan. Manajer Cabang harus mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak terulang kembali, karena dapat merusak bisnis secara keseluruhan. Sosialisasi perlu dilakukan secara rutin dan menyeluruh, tidak sepotong-sepotong. Selain itu, ketidaktransparanan PT Jasa Raharja (Persero) dalam mengelola uang yang berasal dari iuran wajib.

#### **b. Hambatan Eksternal**

Dari tingkat operasional hingga tingkat pusat, hubungan antara PT Jasa Raharja (Persero) dengan pemerintah daerah masih belum ideal, terutama antar staf yang terlibat dalam pelaksanaan dan operasional lapangan. Inspeksi wajib dilakukan oleh auditor atau organisasi independen lain yang memiliki kekuasaan untuk mendorong keterbukaan, kejujuran, dan kewajaran. Kesulitan yang signifikan juga ditemui dalam hubungan dengan penyedia angkutan umum, khususnya dalam hal kontrol pada saat pemungutan retribusi.

Hubungan antara PT Jasa Raharja (Persero) dengan pemerintah daerah dari tingkat operasional hingga pusat masih belum sempurna, terutama antar personel yang terlibat dalam pelaksanaan dan operasional lapangan. Untuk mendorong transparansi, kejujuran, dan kewajaran, diperlukan auditor atau lembaga independen lainnya untuk melakukan pemeriksaan. Masalah signifikan dengan kontrol pada periode ketika biaya dikumpulkan juga dialami dalam perjanjian dengan perusahaan angkutan umum.

Untuk mengatasi masalah ini, tindakan harus diambil, seperti meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara PT Jasa Raharja (Persero) dengan pemerintah daerah dan organisasi terkait, seperti penyedia transportasi umum. Selain itu, inisiatif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman publik tentang

prosedur perlindungan dan klaim kompensasi PT Jasa Raharja. Untuk mewujudkan program Bantuan Kecelakaan (P3K) yang efisien, perlu juga dilakukan penguatan kerjasama antara PT Jasa Raharja, Dinas Perhubungan Darat, dan Dinas Kesehatan. Dengan demikian diharapkan hubungan antara PT Jasa Raharja (Persero) dengan pihak-pihak terkait dapat ditingkatkan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan perlindungan yang lebih efektif bagi korban kecelakaan.

#### **SIMPULAN**

Sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah yang bertugas melaksanakan Opsi Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, PT. Jasa Raharja (Persero) memiliki peran penting dalam memberikan kompensasi underwriting. Pemilik kendaraan bermotor diharapkan untuk menyumbangkan uang santunan sebagai bagian dari komitmen ini, dan uang tersebut selanjutnya akan dibayarkan kepada korban kecelakaan, termasuk mereka yang meninggal dunia, cacat sementara, atau cacat tetap. Peraturan 36/PMK.010/2008 memberikan rincian lebih lanjut tentang besaran santunan dan pembayaran yang diwajibkan kepada Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Pemilik kendaraan bermotor bertanggung jawab atas biaya perlindungan pejalan kaki yang diberikan oleh asuransi kecelakaan lalu lintas jalan bagi pejalan kaki yang tertimpa kendaraan bermotor. Selain itu, korban kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor dan pejalan kaki ditanggung oleh asuransi ini. Dengan bantuan sistem ini, diyakini bahwa korban kecelakaan lalu lintas akan mendapat ganti rugi yang memadai dan pemilik kendaraan bermotor dapat menjalankan kewajibannya untuk menjaga keselamatan lalu lintas dan melindungi korban kecelakaan.

<sup>1</sup>Sihombing, <sup>2</sup>Dompak

## Referensi

- Cardoso. (2005). No Titl. *Menunjukkan Bahwa Semua Dari Rencana Pengurangan Risiko Kecelakaan.*
- Dompok, T. (2018). Pengaruh Inovasi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Samsat Drive Thru: Indonesia. *Dialektika Publik*, 3(1), 9–15.
- Fitri & Kurniawati. (2021). *Skripsi Optimalisasi Insurance Technology Sebagai Solusi Pelayanan Online Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia ( Studi Pada Pt Asuransi Simas Insurtech ) Diajukan Oleh: Lisa Niara Aghnaa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri.*
- Mondong, H. (2013). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *Governance*, 5(1), 1–18.
- Fischer, D. (2013, January 2). Climate Coverage, Dominated By Weird Weather, Falls Further In 2012. *The Daily Climate*. Retrieved From <http://Wwwp.Dailyclimate.Org/Tdc-Newsroom/2013/01/2012-Climate-Change-Reporting>
- cardoso. (2005). No Titl. *Menunjukkan Bahwa Semua Dari Rencana Pengurangan Risiko Kecelakaan.*
- Dompok, T. (2018). Pengaruh Inovasi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Samsat Drive Thru: Indonesia. *Dialektika Publik*, 3(1), 9–15.
- Fitri & Kurniawati. (2021). *Skripsi Optimalisasi Insurance Technology Sebagai Solusi Pelayanan Online Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia ( Studi Pada Pt Asuransi Simas Insurtech ) Diajukan Oleh: Lisa Niara Aghnaa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri.*
- Mondong, H. (2013). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *Governance*, 5(1), 1–18.

## Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kota Batam

<sup>1</sup> Duwi Susilawati <sup>2</sup>Etika Khairina

[duwisusilawati7@gmail.com](mailto:duwisusilawati7@gmail.com) [Etika@puterabatam.ac.id](mailto:Etika@puterabatam.ac.id)

<sup>1</sup> Administrasi Publik Fakultas Sosila Humaniora Universitas Putera Batam

Correspondance: [etika@puterabatam.ac.id](mailto:etika@puterabatam.ac.id)

### INFORMASI ARTIKEL

#### Sejarah Artikel

Diterima Redaksi: 26 Mei 2023

Revisi Akhir: 3 Juni 2023

Diterbitkan Online: 8 Juli 2023

#### KEYWORDS

*Government, Poverty, Strategy*

KORESPONDENSI: ETIKA KHAIRINA

### Abstracts

Poverty is considered as the inability to meet basic economic needs. This article explains the poverty that still exists in Batam and the strategies that can be implemented by the government. The purpose of this study is to describe the government's strategy in overcoming poverty in Batam City. Anti-poverty strategy which means that the government can reduce poverty by creating jobs in labor-intensive sectors. Batam City has implemented an anti-poverty social service strategy and community empowerment, but so far it has not been successful in reducing the current poverty rate. One of the programs implemented by the Batam City government is basic food assistance and alleviating uninhabitable houses. Strategic alternative way as Broadcaster, Director of the Poor, Social Security and Institutional Empowerment. The method used in this research is descriptive. Data collection is done through observation, interviews and documentation. Data collection is described using concepts, variables, dimensions and metrics. Data analysis uses SWOT analysis to identify strengths, weaknesses and challenges to overcome problems. The results of the study show that the government's efforts to break down poverty barriers include strengthening regions through the national economy, implementing anti-poverty policies and programs in both the regional and central government.

### Abstrak

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dasar. Tulisan ini menjelaskan tentang kemiskinan yang masih ada di Batam dan strategi yang dapat dilakukan pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Kota Batam. Strategi anti kemiskinan yang berarti bahwa pemerintah dapat mengurangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja di sektor-sektor padat karya. Kota Batam telah menerapkan strategi pelayanan sosial anti kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, namun sejauh ini belum berhasil menurunkan angka kemiskinan saat ini. Salah satu program yang dilaksanakan pemerintah Kota Batam adalah bantuan sembako dan renovasi rumah tidak layak huni. Cara strategi alternatif sebagai Penyiar, Direktur Fakir Miskin, Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Kelembagaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data dijelaskan dengan menggunakan konsep, variabel, dimensi dan metric. Data analisis menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan dan tantangan untuk mengatasi masalah. Hasil kajian menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk mendobrak sekat-sekat kemiskinan meliputi penguatan pemerintah daerah melalui perekonomian nasional, implementasi kebijakan dan program anti kemiskinan baik di pemerintah daerah maupun pusat.



## Pendahuluan

Kemiskinan adalah jika pendapatan masyarakat kurang dari satu baris kemiskinan tertentu. Kemiskinan juga berarti kurangnya kebutuhan inklusi sosial, termasuk isolasi sosial, ketergantungan dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat mungkin (Khomsan, 2015).

(Statistika, 2020) mendefinisikan kemiskinan ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan akan makanan dan BPS menghitung tingkat kemiskinan peringkat Konsumsi penduduk untuk kebutuhan pokok. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui kebijakan kemiskinan pemerintah,

menganalisis kemiskinan di Batam, melihat bagaimana kemiskinan mempengaruhi kesehatan, pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, dan mengurangi waktu dan kemiskinan daerah. Fokus kajian di sini adalah pada pertanyaan tentang strategi apa yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat miskin di Batam dalam rangka menganalisis kemiskinan yang terjadi di Batam.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kapasitas untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk mengukur kemiskinan. Dari sudut pandang ekonomi, kemiskinan adalah ketidakberdayaan untuk memenuhi makanan pokok ketika pendekatan ini diambil. Atau dianggap gagal, hanya non-makanan kebutuhan diukur dengan biaya. Perkembangan kota dipengaruhi oleh proses

urbanisasi yang terlihat dalam dimensi demografi. Pertumbuhan penduduk perkotaan juga didorong oleh pertumbuhan penduduk alami dan migrasi. Perkembangan tersebut disertai dengan perubahan nyata dalam perekonomian akibat perubahan pekerjaan dari pertanian ke non pertanian, namun pembangunan perkotaan dapat dipahami dari perspektif sosial melalui perubahan kesadaran dan gaya hidup masyarakat.

Anda dapat membaca dan melihat di mana masalah meningkat di Kota Batam dari berbagai media. Masalah yang saya hadapi adalah jiwa yang tinggal di kolong jembatan, angka kemiskinan, meningkatnya angka pengangguran, menipisnya sumber air minum, banjir di banyak daerah saat musim hujan, meningkatnya anak jalanan, meningkatnya pengemis, perampokan dan kriminalitas.

**Tabel 1 Jumlah Penduduk Angka Kemiskinan Kota Batam Tahun 2017-2021**

Tahun	Jumlah Penduduk
2017	61.000
2018	67.000
2019	66.000
2020	67.000
2021	77.000

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik)

Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Batam mencapai 77.000. Pada Maret 2020, angka kemiskinan meningkat sekitar 10.000 orang. Angka kemiskinan Batam mencapai 5,05% pada Maret 2021. Tingkat pertumbuhan moderat Maret lalu dan sekarang di 0,30%. Bahkan, perkembangan garis kemiskinan sejak Maret 2011 hingga Maret

2021 menunjukkan tren yang meningkat. Garis kemiskinan pada Maret 2011 hanya Rp 443.164 perorang. Sedangkan pada Maret 2021 akan mencapai Rp740.109 per orang. Dinyatakan sebagai persentase, jumlahnya meningkat 67% dibandingkan Maret 2011. Jumlah penduduk miskin tumbuh lebih lambat dari total populasi. Meningkatnya jumlah migran tidak terampil telah memperburuk masalah di Batam, di mana pengangguran terus meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya pencari kerja yang datang dari luar Batam. Selain itu, persaingan kerja di Kota Batam terus meningkat. Jumlah pengangguran meningkat karena pendatang tanpa kualifikasi yang layak bergabung dengan masalah kota Batam. Selain itu, persaingan kerja di Kota Batam terus meningkat. Sebanyak 604.831 orang bekerja, 550.813 dari total penduduk bekerja, dan 54.018 tidak masuk atau pengangguran terbuka (TPT). Jumlah pengangguran mencapai 6.654, meningkat 8,93% dibandingkan jumlah pengangguran tahun 2017 (Badan Pusat Statistik, 2018-2020).

Pemerintah telah memperkenalkan beberapa program untuk membantu orang miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka dan program untuk membantu orang miskin memperoleh penghasilan, tetapi pemerintah berharap dapat mengangkat orang miskin dari kemiskinan seiring berjalannya waktu. Hasil yang diharapkan masih jauh. Walaupun dipengaruhi oleh program penanggulangan kemiskinan, hal ini akan atau tidak akan berubah karena kebijakan dan program yang ada telah gagal untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan dan masih belum optimal.

Fokus, masalah pengentasan kemiskinan hanya ekonomi, bukan masalah kemiskinan saat ini. Ada dua penyebab kemiskinan di Kota Batam. Pertama, kemiskinan absolut, adalah ketika pendapatan turun di bawah garis kemiskinan atau mempengaruhi individu atau kelompok yang layak. Kedua, kemiskinan relatif. Situasi pada mana kebijakan membentuk ketidaksetaraan pada pendapatan & tunjangan, yg menyebabkan sejumlah pengangguran

lantaran kesempatan kerja yg nir memadai atau nir memadai. Oleh lantaran itu, taktik kebijakan yang sempurna dibutuhkan buat mengatasi perkara kemiskinan, & impak yg dibutuhkan berdasarkan penerapan taktik kebijakan wajib ditentukan.

## Kajian Teori

### Manajemen Strategis

Para ahli telah memberikan banyak definisi tentang manajemen strategis. Salah satunya adalah definisi yang diberikan oleh J. David Hunger kepada Thomas L. Wheelen, yang mendefinisikan manajemen strategis sebagai keputusan dan tindakan yang konsisten dengan kinerja jangka panjang organisasi. Durasinya bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun. Menurut Sondang, pendapat Hunger dan Wheelen terhadap buku tidak jauh berbeda.

(Efri, 2019) Perencanaan strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat oleh manajemen puncak organisasi, yang dibebankan kepada setiap orang dalam organisasi untuk dapat mencapai tujuan organisasi yang telah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa manajemen strategis adalah serangkaian tindakan di mana keputusan fundamental dan komprehensif dibuat, diikuti dengan metode penilaian dampak, yang juga diterapkan oleh semua manajer dan semua pihak secara berurutan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari suatu lembaga atau organisasi.

Proses manajemen strategis Fred David terdiri dari unsur-unsur berikut: 1. Desain strategis: yaitu membuat dan mengembangkan pernyataan misi yang mengidentifikasi peluang dan risiko bagi para pihak jelaskan kekuatan dan kelemahan pemangku kepentingan eksternal dan internal, tetapkan tujuan jangka panjang dan kembangkan alternatif Menyusun strategi dan menentukan strategi yang tepat. Langkah ini membutuhkan keterampilan kepemimpinan

yang baik Ini membutuhkan kreativitas dan kepekaan manajemen senior. Manajemen organisasi adalah faktor keberhasilan yang paling penting dalam mengembangkan strategi organisasi. 2. Eksekusi strategis: yaitu menetapkan tujuan program, merencanakan kebijakan untuk memotivasi staf dan mengalokasikan sumber daya yang ada untuk memastikan keberhasilan Mengembangkan sistem untuk pembuatan struktur yang efektif, penganggaran dan manajemen informasi organisasi.

Komunikasi penting karena terjemahan rencana strategis untuk manajer dan anggota adalah sama dan mereka memiliki pemahaman yang sama. 3. Penilaian strategis: Periksa faktor eksternal dan internal untuk membangun. Ukur dasar sehari-hari yang mengakibatkan dan pahami strategi dan kinerja ketidakmampuan individu untuk menjamin program tindakan korektif anda saat kelangsungan hidup. Dalam hal ini kapasitas ini. Jika kemacetan signifikan penghasilan adalah pilihan pemenuhan kebutuhan teridentifikasi dalam pelaksanaan pokok sehari-hari.

Harga umum, sehingga kualitas strategi, kemacetan ini harus hidup tidak terpenuhi. Argumen di atas dapat diidentifikasi dan diminimalkan. mengatakan bahwa kemiskinan sendiri atau bersama- Namun, jika strategi yang dipilih sama dengan pemenuhan kebutuhan primer dan gagal, anda mungkin perlu sekunder lainnya di bawah aturan umum kualitas mengadopsi dan mengatur ulang hidup adalah ketidakmampuan ekonomi. strategi organisasi anda Pilih beberapa Definisi kemiskinan ini telah direvisi dan strategi atau pilih strategi yang diperluas berdasarkan permasalahan yang ada dan berbeda. (Fari, 2019) .

### **Kemiskinan**

Menurut Chambers Menurut Sholeh (2010), definisi (Khomsan Ali et al.,2015), ia berpendapat bahwa kemiskinan berkisar dari ketidakmampuan kemiskinan merupakan

konsep terintegrasi dari lima sederhana untuk memenuhi kebutuhan dasar dimensi: konsumen hingga pemahaman yang lebih luas. Kemiskinan adalah masalah yang yang mencakup kondisi yang lebih baik, disebabkan oleh kegagalan ekonomi untuk kurangnya peluang bisnis, dan dimensi sosial dan memenuhi kebutuhan dasar. Istilah atau moral. Kemiskinan biasanya didefinisikan konsep ini berlaku tidak hanya untuk sebagai suatu kondisi dimana pendapatan tidak kolektif yang tidak memiliki pendapatan, dapat menutupi kebutuhan dasar atau tetapi juga untuk kolektif yang sudah menyediakan makanan. Kemampuan untuk memiliki pendapatan. mendapatkan penghasilan yang cukup.

Kelemahan sebagian besar kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dalam kisaran harga yang lemah, pendapatan juga meningkatkan ini rendah dan karenanya tidak menjamin kekuatan sosial secara individu atau pemenuhan standar kualitas hidup secara umum. kolektif, terutama jika seseorang mencapai Dari sudut pandang ekonomi, kemiskinan persamaan hak atau hak atas kehidupan yang adalah kondisi kehidupan yang tidak terpenuhi. layak. Penghasilan kecil sendiri atau bersama-sama. Kerentanan dalam situasi darurat adalah untuk menutupi kebutuhan pokok, baik itu kondisi individu atau kelompok yang sandang, pangan dan makan. Dan itu tergolong miskin ketika mereka tidak mempengaruhi pemenuhan standar kesehatan mampu menghadapi situasi tak terduga yang dan pendidikan yang sesuai. Secara lebih umum, sebenarnya membutuhkan pendapatan untuk kemiskinan juga dapat dijelaskan sebagai mengatasinya. Misalnya, kita harus kondisi pendapatan individu atau kolektif menghadapi situasi genting seperti bencana ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan alam.

Kesehatan yang membutuhkan pembiayaan medis yang mahal dan keadaan darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan yang kuat untuk memenuhi kebutuhan dapat menutupinya. Keadaan kemiskinan ini dianggap

mustahil dalam keadaan darurat seperti bencana alam.

Ketergantungan adalah keadaan yang dialami oleh seseorang yang membatasi kemampuan penghasilan atau kekuatan sosialnya yang disebut miskin. Dimana kecocokan yang tidak baik dapat menimbulkan ketergantungan pada pihak lain. Anda ditolak keterampilannya kemampuan untuk menciptakan solusi yang memecahkan masalah yang ada berarti menghasilkan pendapatan baru. Demikian terima kasih Seseorang membutuhkan ingatan untuk menyelesaikan masalah.

Keterasingan (isolasi) adalah dimensi. Chambers mengacu pada negara di mana individu atau kolektif dimiskinkan karena faktor lokal. Hal ini karena masyarakat miskin tinggal jauh dari pusat pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, sebagian besar layanan kesejahteraan terkonsentrasi hanya di pusat Kota atau Daerah perkotaan dan kota-kota besar. Hal ini tentunya karena masyarakat tinggal di daerah terpencil atau jauh dari pusat pertumbuhan seperti Kota besar sehingga sulit bagi mereka untuk mengakses pelayanan sosial, maka hal tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang tinggal jauh dalam pembangunan kemiskinan kota dalam.

### **Analisis SWOT**

Pada dasarnya analisis SWOT adalah metode atau teknik untuk mengidentifikasi secara sistematis berbagai faktor atau elemen yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Ketika metode analisis SWOT dikembangkan untuk menilai situasi lapangan, dapat digunakan untuk merumuskan strategi pengembangan sistem yang lebih baik, dan juga dapat digunakan sesuai dengan kondisi dan karakteristik sistem. Perusahaan, organisasi, dan otoritas terlibat dalam implementasinya. Teknik analisis SWOT sering digunakan untuk menyusun dokumen perencanaan, khususnya rencana strategis.

Pendekatan desain ini mengarah pada strategi pengembangan yang lebih tepat sasaran

berdasarkan potensi fasilitas yang ada. Selain itu, peluang eksternal dapat digunakan untuk mengembangkan program dan kegiatan yang lebih baik untuk mengatasi kelemahan internal. Dalam beberapa situasi, analisis strategis yang lebih akurat dan realistis harus dilakukan. Tentunya dokumen tersebut dapat disusun dengan menggunakan teknik analisis SWOT.

Analisis SWOT pada dasarnya adalah metode atau teknik untuk mengidentifikasi faktor dan elemen mana yang secara sistematis digunakan untuk menentukan perkembangan di masing-masing institusi. Tujuan dari teknik analisis SWOT adalah untuk memahami kondisi ruang lingkup, yaitu H. untuk operator, yang kemudian dapat bertanggung jawab untuk merancang strategi pengembangan yang dapat diterima sesuai dengan keadaan.

Dalam praktiknya, ini dapat berupa, misalnya, perusahaan, organisasi, dan otoritas. Analisis SWOT ini memandu kesehatan umum lembaga, terkait baik secara eksternal maupun internal dengan lokasi untuk mencapai tujuan, visi dan misi yang sebelumnya ditetapkan oleh para pengusaha membuat rencana strategis (Renstra).

Teknik SWOT kemudian menjadi sangat populer seperti kutipan (Fahmi, 2015: dalam perencanaan strategis RPJMD daerah dan 265), terdapat beberapa strategi turunan dari lembaga negara, terutama setelah otonomi daerah metodologi analisis SWOT yang dapat diberlakukan pada tahun 2001. Teknik analisis digunakan sebagai berikut: SWOT memiliki dua aplikasi utama dalam 1. Strategi SO (strength-opportunities). menyusun rencana.

Pertama menggunakan teknik Kekuatan atau strategi keuntungan analisis SWOT dan kemudian membahas kesehatan yang ada dalam suatu organisasi, keseluruhan wilayah atau instansi, kekuatan, termasuk peluang atau kekuatan yang kelemahan, ancaman dan peluang juga disorot dalam dapat digunakan untuk menentukan perumusan strategi, kebijakan dan program kombinasi kekuatan dan peluang serta manajemen. Pembangunan menjadi lebih tepat,

<sup>1</sup>Duwi Susilawati <sup>2</sup>Etika Khairina

menggunakan strategi yang mencakup konkrit dan terarah jika keadaan umum daerah dapat peluang sebanyak mungkin. dianalisis dengan berbagai metode.

Kedua, Strategi WO (weakness-opportunities) Penyusunan strategi pembangunan daerah akan Strategi ini digunakan untuk dipertajam, tergantung pada peluang dan kondisi memitigasi kelemahan dan kekurangan sektor dan instansi terkait. Hal ini memungkinkan yang ada di dalam organisasi itu keberhasilan pelaksanaan strategi untuk sendiri dan memanfaatkan peluang pengembangan beberapa sektor yang relevan.

Hal yang ada di luar atau di lingkungan ini sangat penting jika strategi pembangunan yang eksternal. Ini adalah kesempatan Anda direncanakan hanya didasarkan pada keumuman untuk menang. dan bukan pada potensi lokal. Pencapaian tujuan. Ketiga, Strategi ST (Strength-Threat). Strategi pembangunan daerah mungkin rendah atau bahkan Peningkatan Kekuatan digunakan tidak ada sama sekali. Meskipun teknik analisis untuk menghilangkan atau melawan SWOT sangat populer, namun tidak dapat ancaman eksternal yang muncul dari dipungkiri bahwa teknik ini juga memiliki dalam suatu organisasi dan datang dari kekurangan dan keterbatasan.

Ke-empat Strategi WT (weakness-threat). Sebuah adalah subjektivitas desainer yang besar strategi yang menangani kerentanan selama analisis. Hal ini tercermin dalam internal atau organisasi itu sendiri definisi item analisis SWOT seperti untuk mengurangi kerentanan yang (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan ada dan mengungkap ancaman masa Ancaman) Sehingga diperlukan hal-hal depan yang datang dari luar atau di yang dapat meningkatkan objektivitas luar organisasi.

analisis SWOT ini dan analisis ini juga Teknik analisis SWOT dikenal sebagai harus didukung Gunakan data kuantitatif teknik praktis dan bahkan sangat populer terutama saat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang,

dan ancaman. Kita tetap tidak bisa menyalahkan teknik analisis SWOT Mengenai pernyataan anggaran, perlu untuk mengintegrasikan isu secara sistematis dan menggunakan secara sistematis untuk mengimplementasi strategi dan pedoman pembangunan daerah yang diumumkan untuk mengimplementasi pernyataan anggaran tertentu. Teknik analisis ini juga berlaku untuk SWOT, namun berkaitan langsung dengan perspektif anggaran yaitu Mulyadin (Sjafrizal, 2015).

Jurnal JISPO Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Strategi Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tasikmalaya, sebuah kajian yang dilakukan oleh Iwan Satib dan Undang Sudrajat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan. Penelitian ini menggunakan metode campuran yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan anti kemiskinan di Kota Tasikmalaya belum sepenuhnya efektif.

## Metode Penelitian

Sifat penelitian ini adalah kualitatif. Peneliti mendeskripsikan dan menganalisis masalah di area ini. Selama studi, wawancara, observasi dan dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data, dan dukungan sosial diberikan kepada masyarakat miskin. Peneliti melakukan analisis data dengan mereduksi data menjadi informasi yang diperoleh peneliti di lapangan. Pada saat yang sama pengumpulan data disajikan dengan cara yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Dan menarik kesimpulan dengan metode yang anda gunakan.

## Hasil Dan Pembahasan

### Program Bantuan Sosial pada Dinsos-PM

BPNT ialah salah satu program dukungan pemenuhan pangan menurut tingkat kewajaran atau kewajaran, yang dilaksanakan dengan cara menukarkan kartu elektornik yang

digunakan masyarakat membeli beras dan pangan.

RTLH adalah kegiatan yang mendukung perbaikan/rehabilitasi rumah yang dilakukan terhadap rumah milik KK miskin. Dengan kata lain, program ini ditujukan untuk orang yang sudah menikah.

### **Indikator penelitian dengan menggunakan teknik analisis SWOT**

Kekuatan, Keuntungan yang ada di dalam agensi yang meningkatkan atau memberikan keunggulan atas agensi, seperti bakat atau program inti yang tepercaya. Memberikan mekanisme penyaluran bantuan dan penyederhanaan prosedur administrasi untuk memudahkan penerima bansos melengkapi prosedur membantu penerima bansos memperoleh bansos dengan lebih mudah, dan membantu penyaluran Mengembangkan kelembagaan dan infrastruktur.

KPM hanya boleh membawa Kartu Keluarga Sejahterajika membutuhkan bantuan e-warung sebagai berikut: Tentu saja, ini membuat pendistribusian bantuan menjadi lebih mudah. Distributor bantuan cukup menunggu di stan elektronik yang didirikan di setiap distrik dan berjalan-jalan di Batam ketika ada panggilan masuk untuk meminta bantuan. KPM akan mengantar langsung dari rumah Anda ke lokasi e-warung terdekat tanpa masalah dibandingkan dengan pesaing kami dan agensi lainnya.

Kelemahan, didasarkan pada satu lembaga atau daerah dibandingkan dengan yang lain. Apa yang telah dilakukan Kementerian Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Batam untuk memerangi atau mengurangi kemiskinan dengan menggunakan program donasi yang indeksnya lemah. Dinas Sosial cukup memasukkan data KPM ke dalam database gabungan untuk menangani masyarakat miskin, dan pusat memeriksa data dan memutuskan siapa yang berhak menerima sumbangan. Donasi tidak ditanggung, mungkin karena KPM miskin pada saat pencatatan, tetapi

untuk menggunakan waktu KPM beroperasi di atas kemiskinan, atau bisa dibilang hidup lebih layak, KPM donasi BPNT tidak tepat sasaran sebagai KPM sentra pangan masih menerima donasi sebagaimana terkonfirmasi berdasarkan data KPM meskipun diberitahu bahwa mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk menerima donasi.

Peluang, yang ada di luar institusi digunakan perusahaan untuk mendorong institusi. Manfaat program BPNT meningkatkan taraf hidup secara ekonomi dengan mendukung kebutuhan pangan pemerintah. Dandari sudut pandang keuangan, Anda pasti dapat mengalihkan pengeluaran belanja bahan makanan Anda ke penggunaan lain. Hal ini akan memungkinkan KPM untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dari waktu ke waktu dan memenuhi tujuan Departemen Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Singkatnya, program BPNT akan mengurangi kemiskinan Kota Batam.

Ancaman Kota Batam yang memiliki dua program yaitu Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengatasi Masalah Kemiskinan Dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), terdapat hambatan atau kendala dalam memantau penerima manfaat yang telah keluar dari kemiskinan atau menerima bantuan dan KPM jika tidak memenuhi persyaratan bantuan beras BPNT. Jika Anda merasa perlu menjadi KPM dan telah melakukannya, jangan terima dukungan dari BPNT dalam kategori yang ditentukan oleh Pusat.

Hubungi asisten distrik anda atau hubungi kantor terkait secara langsung. BPNT menemukan bahwa mereka yang dihubungi tidak lagi memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan. Jika ini terus berlanjut, tujuan program BPNT untuk membantu masyarakat miskin. Tekanan dan rasa sakit eksternal terhadap program RTLH merupakan kecemburuan sosial di antara mereka yang memiliki puluhan rumah di kecamatan, tetapi dukungan untuk RTLH pada akhirnya terbatas di dalam kecamatan.

<sup>1</sup>Duwi Susilawati <sup>2</sup>Etika Khairina

Setiap Kerulahan berhak mengajukan nama untuk bantuan rehabilitasi RTLH. Sebelumnya, rumah-rumah penerima disaring langsung berdasarkan kriteria yang digunakan di desa dan diidentifikasi serta disetujui oleh RT. RW dan tokoh masyarakat. Menyusul Kementerian Sosial dan Kemasyarakatan. Sementara itu, program RTLH memiliki keterbatasan atau kendala eksternal. Terjadi kecemburuan sosial di antara warga setempat dan puluhan warga setempat menerima bantuan RTLH, namun pada akhirnya hanya dua orang yang menerima bantuan RTLH dari suatu entitas.

Setiap kabupaten berhak menyerahkan kepada Dinas Sosial dan Dinas Kota nama-nama yang berhak mendapatkan bantuan rehabilitasi RTLH dan RT, RW, sertanama-nama yang telah diakui dan dipromosikan oleh pemerintah Kota. Pengentasan kemiskinan di Kota Batam dilaksanakan melalui bakti sosial dan pemberdayaan masyarakat di Kota Batam. Jika kondisi tersebut terkait dengan faktor internal, alternatif strategi pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, maka kedua elemen tersebut harus didiskusikan secara detail untuk menyusun strategi pembangunan.

Berikut adalah matriks SWOT yang telah diidentifikasi sebelumnya:

- a. Bakti Sosial Kota Batam dan Strategi Pemberdayaan masyarakat SO suatu lembaga atau organisasi dapat mengembangkan strategi leveraging power dengan memanfaatkan peluang di luar lembaga tersebut. Seperti dijelaskan di atas, kami mendukung pemrograman saat dukungan sudah tersedia. Strategi pertama adalah meningkatkan penyaluran bantuan kepada penerima manfaat, dan mengatasi kemiskinan. Strategi lainnya adalah meningkatkan program bantuan sosial bagi masyarakat miskin, membantu mereka keluar dari kemiskinan, membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan, serta mengubah pola pikir mereka agar dapat

bergerak dari kemiskinan menuju perubahan.

- b. Dinas Sosial Kota Batam dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat ST Untuk strategi yang muncul dari persimpangan kekuatan dan ancaman, di mana ancaman muncul dari kekuatan sosial dan komunitas eksternal, strategi pertama adalah meningkatkan pengawasan atau menyaring pihak yang berbuat baik dari program bantuan. Jatuh cinta dengan orang yang tidak berhak atas bantuan sosial. Strategi lainnya adalah meningkatkan sarana untuk mendukung dan mempercepat program bantuan mata pencaharian bagi penerima manfaat, misalnya dengan memperluas operasional- warung .
- c. Strategi WO untuk bakti sosial dan pemberdayaan masyarakat di Kota Batam Indikator penyeleksian penerima kesejahteraan harus diperbaiki agar program bantuan berjalan efektif. Doakan agar program bantuan pendapatan ini dapat mengurangi jumlah orang miskin. Kemudian strategi lainnya adalah meningkatkan tingkat dukungan pendapatan dimana dukungan pemerintah benar-benar mencukupi dan kebutuhan dasar masyarakat miskin terpenuhi.
- d. Strategi WT Bakti Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Memperbaiki indikator kinerja yang harus menunjukkan indikator yang jelas dan stabil bahwa masyarakat penerima bantuan pendapatan benar-benar miskin. Agar program bantuan pendapatan dapat mencapai tujuannya atau menjadi bagian dari hak masyarakat miskin. Strategi lainnya adalah menggalakkan sosialisasi dengan mengedukasi masyarakat tentang mata pencaharian masyarakat miskin agar tidak timbul kecemburuan sosial di masyarakat.

## Faktor penghambat dan faktor pendukung program BPNT dan RTLH

a. Strategi penanggulangan kemiskinan kelembagaan sosial dan pemberdayaan masyarakat ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan program bantuan sosial untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Batam. a. Keterbatasan anggaran negara menghambat program rehabilitasi pekerja sosial dan masyarakat RTLH dan anggaran program RTLH ini harus ditinjau kembali agar tujuan program RTLH ini dapat mengurangi kemiskinan di Kota Batam. b. Ketidakjelasan pemilihan penerima manfaat atau kriteria yang ditetapkan pemerintah untuk menentukan penerima manfaat merupakan salah satu kendala dan konsekuensi dari program anti kemiskinan untuk memastikan bahwa setiap orang menerima bantuan ini, karena distribusi penerima manfaat tidak tepat. Dalam hal ini program memperumit tujuan program bantuan pendapatan dan meningkatkan kemiskinan riil.

2. Faktor Pelayanan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Batam adalah sebagai berikut: a. Kemudahan akses bantuan pendapatan pemerintah merupakan salah satu faktor pendukung program pemerintah dan cakupan administrasi yang sangat mudah dan tidak membebani penerima manfaat. Ini adalah salah satu faktor pendukung yang membantu utilitas mencapai hasil yang maksimal. b. Bantuan keuangan dimana manfaat pemerintah tersebut nyata bagi penerimanya sehingga bantuan tersebut tidak dapat digunakan untuk hal yang sama sekali tidak membantu masyarakat miskin.

## Kesimpulan

Setelah meninjau hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Berikut analisis SWOT strategi pelayanan sosial masyarakat miskin dan pemberdayaan masyarakat di Kota Batam: a. Strategi pertama berdasarkan (strengths-opportunities), yaitu kesederhanaan dan

efisiensi prosedur administrasi dan alokasi dukungan kepada penerima manfaat dan dua instrumen. b. Strategi sejak awal (Force Threats) adalah meningkatkan pemantauan terhadap program penanggulangan agar tepat sasaran.

b. Strategi yang muncul dari (kelemahan-peluang) yaitu memperluas mekanisme pemilihan program hidayat binaan dan kedua meningkatkan anggaran program perumahan binaan. Strategi yang diturunkan dari strategi (kelemahan-ancaman) adalah meningkatkan indeks penerimaan dukungan pendapatan Kota dan kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat miskin Kota tentang dukungan tersebut.

Kota Faktor Penghambat dan Pendukung Program Bantuan Sosial PM Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batam: a. Program PM Pelayanan Sosial Disabilitas Penanggulangan Kemiskinan Kota Batam: Anggaran yang terbatas, kriteria atau faktor yang tidak jelas untuk memilih penerima zakat.

Faktor-Faktor Dibalik Program Bantuan Sosial Perdana Menteri Bhakti Sosial Untuk Memerangi Kemiskinan di Kota Batam: Langkah Sederhana, Tanpa Dana Saran Berdasarkan hasil kajian, peneliti memberikan saran yaitu:

1. Keluarga miskin yang penghasilannya di bawah garis kemiskinan.

2. Pemerintah hendaknya meninjau kembali pemilihan penerima program bantuan BPNT dan RTLH agar keinginan dapat terlaksana sehingga program ini tercapai efek yang sangat baik mengurangi jumlah orang miskin.

3. Pemerintah hendaknya membuat program yang merubah sikap masyarakat miskin untuk berusaha meningkatkan taraf hidup.

4. Pemerintah harus memiliki strategi bantuan bersyarat atau Penyebab utama kemiskinan di Kota Batam saat ini adalah tingginya angka pengangguran.

## Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2020). Jumlah Penduduk Miskin Kepri Kemiskinan di Indonesia. 2020.

Wikipedia Ensiklopedia gratis. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan\\_di\\_indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan_di_indonesia). Satibi Ivan dkk (2019).

Strategi Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya.

Jurnal Ilmu Sosial dan Politik JISPO, 9. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jispo.v9i2..5550> Idtesis, 2018.

Teori Lengkap tentang SWOT Analysis menurut Para Ahli dan Contoh Tesis SWOT Analysis. <http://idtesis.com/teori-lengkap-tentangswot-analysis-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-swot-analysis>

## Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Kota Batam

<sup>1</sup>Ayu Wulandari

<sup>1</sup>Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

email: [pb191010038@upbatam.ac.id](mailto:pb191010038@upbatam.ac.id)

correspondance: [pb191010038@upbatam.ac.id](mailto:pb191010038@upbatam.ac.id)

### INFORMASI ARTIKEL

#### Sejarah Artikel

Diterima Redaksi: 26 Mei 2023

Revisi Akhir: 3 Juni 2023

Diterbitkan Online: 8 Juli 2023

#### KEYWORDS

*Policy, homeless people, beggars*

### KORESPONDENSI

No HP:

E-mail: [pb191010038@upbatam.ac.id](mailto:pb191010038@upbatam.ac.id)

### Abstracts

Homeless people and beggars on the streets are troubling the people of Batam City. In addition, it also violates the public order of Batam City because Batam is a homeless and beggar-free area. Homeless and beggars are often found at red lights and the control of homeless people has been carried out by the Batam city government. The control was carried out through the Batam City Social and Community Empowerment Service or known as UPTD Nilam Suri, but there were still homeless people roaming around. The purpose of this study is to analyze the evaluation of social service policies in dealing with homeless people and beggars as well as the factors that become obstacles to policy evaluation. This research needs to be carried out so that the Batam City government provides a new breakthrough to overcome the problem of homeless people and beggars who still roam the streets and provide a deterrent effect. This aims to make Batam City free of homeless people and beggars. The type of research used is descriptive qualitative, to provide an understanding of the problem under study. The results of the study show that the Policy Evaluation of the Social Service in dealing with homeless and beggars in Batam City has been going well but not optimal. This is due to budget constraints so that the number of human resources or HR qualifications, and supervision is inadequate.

### Abstrak

Gelandangan dan pengemis di jalanan meresahkan masyarakat Kota Batam. Selain itu, juga melanggar ketertiban umum Kota Batam karena Batam merupakan daerah bebas gelandangan dan pengemis. Gelandangan dan pengemis banyak dijumpai di lampu merah dan penertiban gelandangan sudah dilakukan oleh pemerintah kota Batam. Penertiban dilakukan melalui Dinas Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat Kota Batam atau dikenal dengan UPTD Nilam Suri, namun masih ada gelandangan yang berkeliaran. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis evaluasi kebijakan dinas sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis serta faktor-faktor yang menjadi penghambat evaluasi kebijakan. Penelitian ini perlu dilakukan agar pemerintah Kota Batam memberikan terobosan baru untuk mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis yang masih berkeliaran di jalanan serta memberikan efek jera. Hal ini bertujuan agar Kota Batam bebas dari gelandangan dan pengemis. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, untuk memberikan pemahaman terhadap masalah yang diteliti. Hasil kajian menunjukkan bahwa Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis di Kota Batam sudah berjalan dengan baik namun belum optimal. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran sehingga jumlah SDM atau kualifikasi SDM, dan pengawasan kurang memadai.

## Pendahuluan

Sebagai salah satu Negara berpenghasilan menengah Indonesia tetap dianggap sebagai negara berkembang. Setiap bangsa didorong untuk meningkatkan pembangunan, kesejahteraan sosial, dan tingkat kecanggihannya. Di dalam Proses pembangunan memiliki aspek positif dan negatif, sehingga sulit untuk membedakannya dari proses pembangunan. Negara berkembang menghadapi berbagai masalah pembangunan. Untuk itu dibutuhkan pengembangan dalam peningkatan nilai-nilai positif sehingga dampak negatif menurun perlahan, kemiskinan merupakan masalah paling tinggi dan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah saat ini.

kemiskinan merupakan keadaan dimana individu mengalami ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik itu kebutuhan rumah tangga, sosial dan ekonomi yang berdampak pada lingkungan, interaksi sosial dikarena minimnya penghasilan (Bahagia, 2020). Kemiskinan terdiri dari tiga jenis yaitu 1) kemiskinan absolut yaitu seseorang individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan sandang, pangan, serta pemenuhan pendidikan dan kesehatan. 2) kemiskinan relatif, apabila seseorang individu mampu menyediakan kebutuhan hidup tetapi masih dikatakan miskin karena ketebatasan kemampuan seperti skill dan pengalaman. 3) kemiskinan kultural merupakan kemiskinan karena tidak adanya usaha dari individu untuk memenuhi kebutuhan hidup dikarenakan rasa malas dan tingkat kepedulian yang kurang (Zamharira & Arantika, 2018). Kemiskinan inilah yang menjadi salah satu faktor individu menjadi gelandangan dan pengemis.

Salah satu kota dengan jumlah pengemis dan gelandangan yang tinggi adalah Kota

Batam. Kota Batam sendiri merupakan salah satu kota yang mempunyai potensi tinggi untuk memperbaiki perekonomian Indonesia karena Kota Batam berbatasan dengan negara luar yaitu negara Singapura dan Malaysia yang menunjang para pembisnis untuk berinvestasi di bidang industri dan pariwisata.

Selain itu, kondisi ekonomi Kota Batam yang terus meningkat membutuhkan kesiapan mental dan persaingan yang ketat terutama dalam bidang pendidikan, skill, pengalaman yang berpengaruh besar dalam pemenuhan kebutuhan hidup, akan tetapi hal tersebut berbanding terbalik apabila kurangnya pendidikan, skill dan kesiapan diri untuk menghadapi perubahan lingkungan menyebabkan meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Batam. Keadaan tersebut cukup berdampak buruk pada kenyamanan masyarakat, para wisata dan lingkungan sekitar.

Dalam hal ini sangat disayangkan jika Pemerintah Kota Batam tidak melakukan tindakan terkait munculnya para gelandangan dan pengemis. Permasalahan ini tentunya tidak sesuai dengan Kebijakan pemerintah yang mengatur tentang kota Batam yang merupakan kota bebas dari gelandangan dan pengemis yang telah ditetapkan dalam PERDA Kota Batam No. 06 Ta. 2002 yaitu Ketertiban Sosial di Kota Batam dilanggar dengan adanya gelandangan dan pengemis selain merusak pemandangan dan meresahkan masyarakat (Jalizar, 2019). Dalam mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis tersebut Pemerintah Kota Batam berupaya mengarahkan gelandangan dan pengemis (Gepeng) di beberapa ruas-ruas jalan yang ada di Kota Batam terus diadakan melalui razia secara rutin. Dalam hal ini Dinas Sosial juga berperan dalam penanganan para pengemis

dan gelandangan. Kemudian tindakan selanjutnya dilakukan pemerintah Kota Batam melalui pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial tidak berpengaruh terhadap perubahan sikap dari gelandangan dan pengemis di Kota Batam yang terus kembali dijalan untuk mengemis (Batampos.co.id).

Adapun jumlah gelandangan dan pengemis pada tahun tersebut seperti tabel berikut:

**Tabel 1.1 Rata-rata jumlah peningkatan Gelandangan dan Pengemis di Kota Batam tahun 2017-2018**

No	Tahun	Gelandangan	Pengemis
1	2017	1.200	700
2	2018	333	-
3	2019	588	300

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah gelandangan dari tahun 2017 sangatlah tinggi. Kemudian pada tahun 2018 jumlah gelandangan menjadi berkurang dan meningkat lagi pada tahun 2019 dengan jumlah 588 jiwa sedangkan pengemisnya 300 jiwa. Sedangkan jumlah pengemis pada tahun 2017 juga sangat tinggi dengan jumlah 1.200 jiwa dan pengemis 700 jiwa.

Kemudian tahun 2018 bebas pengemis, tetapi jumlah gelandangan ada 333 jiwa yang sedikit terjadi penurunan, hal tersebut tidak bertahan lama dimana pada tahun 2019 terjadi peningkatan dari tahun 2018 dengan total peningkatan 255 jiwa. Untuk itu, Pemerintah perlu melakukan evaluasi ulang dalam penanganan peningkatan jumlah pengemis dan gelandangan tersebut. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian agar mengkaji lagi permasalahan yang ada dengan berfokus pada Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Batam.

## Kajian Teori

Kebijakan publik adalah Instansi pemerintah yang membuat sejumlah keputusan yang saling terkait di setiap bidang terkait dengan tugasnya, termasuk pertahanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kejahatan, kota, dan lainnya (Wahab, 2021). Kebijakan biasanya digunakan untuk memilih dan menyoroti keputusan paling penting untuk meningkatkan fungsi organisasi pemerintah dan swasta. Satu-satunya tujuan kebijakan adalah untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah di masa depan.

Untuk membedakan perilaku politik yang tidak pantas dari perilaku institusional atau kepentingan pribadi, istilah "kebijakan" sering digunakan secara berlebihan (Putra, 2017). Kebijakan publik memiliki definisi yang serupa, yang masing-masing menunjukkan penggunaan tingkat perbandingan nilai untuk membandingkan hasil kebijakan dan perencanaan program yang telah di tentukan (Hayat, 2018).

Dari permasalahan tersebut, sangat di perlukan tindakan pemerintah dengan cara mengevaluasi ulang dalam peningkatan jumlah pengemis dan gelandangan. Dari penjelasan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan yang ada yang berjudul ``Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial Dalam Penganganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Batam.

Kebijakan adalah kumpulan perbuatan, sikap, tujuan, dan pilihan yang dibuat oleh pelaku (pihak yang berafiliasi) dalam upaya untuk memecahkan masalah. Perlu di pahami bahwa dari berbagai kebijakan yang telah di rencanakan memiliki kelemahan dan kekurangan masing-masing dalam pelaksanaan maupun hasil yang diharapkan, kemudian disempurnakan kembali oleh mereka yang mendorong kebijakan. Evaluasi merupakan langkah terakhir dalam menentukan apakah suatu program atau kebijakan yang telah

ditetapkan dapat mencapai tujuannya. sehingga pemerintah dapat menilai dampaknya terhadap masyarakat dan menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan (Agustino, 2012). Penilaian dari tingkat keberhasilan dari kebijakan yang telah direncanakan dan kemudian di implementasikan di sebut evaluasi kebijakan. Pentingnya dilakukan evaluasi kebijakan untuk mengurangi kemungkinan adanya masalah-masalah baru, disebabkan adanya perwujudan dari pkepentingan pribadi yang dilakukan oleh pihak berkepentingan dan pihak penguasayeng menyebabkan kebijakan yang telah telaksana tidak berjalan sesuai dengan perencanaan, sehingga ketetapan dan kuatnya kebijakan tidak bertahan lama (Hardini, 2013).

Adapun tahap evaluasi kebijakan yang harus diambil saat melakukan evaluasi kebijakan. Metode evaluasi menggunakan tipe sistematis yang disebut evaluasi ilmiah sebagai evaluasi yang baik. Menurut pall dikutip oleh (Hayat, 2018) dalam hal ini evaluasi kebijakan di bedakan menjadi empat bagian, yaitu: perencanaan dan kebutuhan, proses, dampak, dan efisiensi. Ada berbagai langkah yang harus diambil saat melakukan evaluasi kebijakan. Metode evaluasi menggunakan tipe sistematis yang disebut evaluasi ilmiah sebagai evaluasi yang baik. Indikator Evaluasi menurut (Maulina, 2020) terdiri dari:

#### 1) Indikator input

Yang menjadi fokus penilaian pertama, dilihat dari penyediaan sumber daya dan penyediaan kebutuhan dasar, sebagai pendukung dari pelaksanaan kebijakan.

#### 2) Indikator proses

Bentuk penilaian yang dilakukan dengan melihat cara menyampaikan dan mengsosialisasikan kebijakan seperti pemberian pelayanan secara langsung, memaksimalkan kepada masyarakat sehingga adanya kepuasan pelayanan yang diterima oleh masyarakat.

#### 3) Indikator Output

Penilaian terhadap keberhasilan implementasi kebijakan yang dapat dinilai dari tingkat partisipasi dari masyarakat yang ikut bergabung dalam mewujudkan keberhasilan program yang telah direncanakan.

#### 4) Indikator Dampak

Penilaian yang membebaskan pada apa saja yang terjadi setelah kebijakan tersebut di implementasikan dan apakah kebijakan tersebut membawa perubahan.

Menurut (Anderso, 2018) Faktor yang mempengaruhi Evaluasi ada beberapa bagian:

#### 1) Sumber daya tidak memadai

Penyediaan sumber daya yang kurang akan berpengaruh terhadap evaluasi kebijakan.

2) Cara implementasi yang tidak tepat yaitu pelaksanaan implementasi kebijakan tidak sesuai keadaan dan kebutuhan saat itu sehingga akan berdampak pada kerugian terutama pada materi, pengadaan barang dan keuangan.

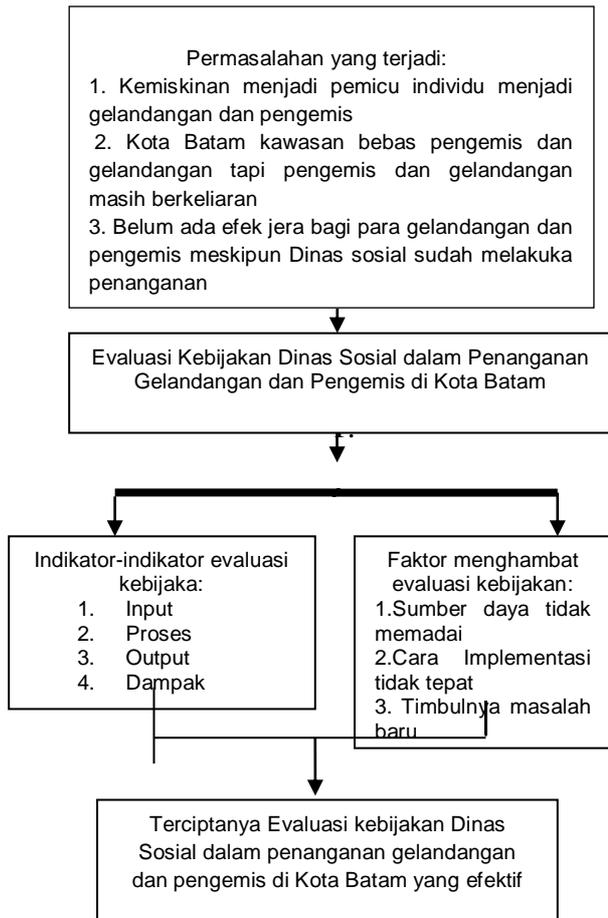
3) Timbulnya permasalahan baru sehingga mendorong pengalihan perhatian dan tindak.

Penelitian yang dilakukan oleh Vania (2021) dengan judul Evaluasi program desaku Menanti dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Padang. Penelitian kualitatif dapat disimpulkan bahwa dampak pelaksanaan program Desaku Menanti dalam menangani gelandangan dan pengemis di Kota Padang belum optimal. Hal ini dikarenakan belum tercapainya tujuan program Desaku Menanti.

Penelitian yang dilakukan oleh (Yakobus, 2017) dengan judul evaluasi implementasi program penanganan anak jalanan, dan pengemis berdasarkan peraturan daerah Kota Malang Nomor 9 tahun 2013. Penelitian kualitatif dengan kesimpulan bahwa tinjauan pelaksanaan program terkait penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis berjalan lancar. Elemen pendukung meliputi linearitas, efisiensi yang membuahkan hasil positif, dan produktivitas yang diharapkan. Unsur penghambat meliputi linearitas

pendanaan yang kurang, sumber daya manusia yang tidak memadai, dan keterlambatan. Tujuan untuk efisiensi penggunaan sumber daya belum terpenuhi. Tingkat produktivitas yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Malang belum tercapai. Kerangka Pemikiran Dalam Tulisan ini ialah dapat dilihat gambar di bawah ini.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



( Sumber: Data Peneliti 2023)

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017) yaitu menyatakan bahwa peneliti adalah yang paling utama dalam penelitian kualitatif, dan metode pengumpulan data meliputi triangulasi (gabungan), analisis data induktif/kualitatif, dan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian untuk mempelajari keadaan objek yang alamiah berdasarkan konsep post-positivis, dengan peneliti sebagai

alat utamanya. Alih-alih menggeneralisasi, kita harus fokus pada makna. Tujuan peneliti adalah melakukan penelitian kualitatif yang menelaah pertanyaan-pertanyaan yang masih samar-samar dengan maksud untuk menggali lebih dalam tentang keadaan yang terjadi di lapangan sehingga data dan fakta dapat diperoleh.

Sumber Data, Untuk penelitian ini sumber data yang di peroleh berdasarkan pada (Sugiyono, 2017) Data Primer merupakan data yang dikumpulkan dan didapatkan langsung oleh peneliti dengan melakukan wawancara dari pihak yang telah ditentukan terlebih dahulu yang berkaitan tentang permasalahanyang diteliti. Sedangkan yang menjadi sumber data primer di peroleh dari wawancara kepala UPT panti rehabilitasi sosial Nilam Suri, Kasubag TU, penanggungjawab panti rehabilitasi sosial Nilam Suri, bidang pekerja sosial, gelandangan dan pengemis yang direhabilitasi dan masyarakat. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung didapat dari sumbernya. Data sekunder di peroleh peneliti melalui penelitian terdahulu, buku-buku, jurnal, media cetak, website Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.

Metode Analisis Data Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017)menjelaskan bahwa ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menganalisis data . Reduksi data Peneliti mengumpulkan ringkasan dari data-data, inti masalah dan kebenaran informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian. Mendatangi secara langsung Dinas Sosial bagian dari tindakan yang dilakukan oleh peneliti untuk mudah memperoleh data. Tujuan dari penyajian data yaitu untuk melihat tingkat pemahaman dari peneliti dalam dalam memahami data yang diperoleh.

Penarikan kesimpulan Masalah baru yang tidak pernah ada sebelumnya dan dibuktikan kebenaran, relevansi dengan menseskripsikan objek permasalahan yang pada awalnya tidak adanya kepastian penyebab timbulnya permasalahan, kemudian di temukan

kebenaran yang menimbulkan adanya interaksi-intraksi, hipotesis, dan memungkinkannya terbentuknya teori baru setelah dilakukan penelitian Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017). Metode pengumpulan data yaitu Observasi.

Observasi adalah proses mengamati objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan memperhatikan langsung fenomena yang terjadi di lapangan dan mencatat hasil dari pengamatan yang dilakukan. Pada penelitian ini, yang dilakukan peneliti pada penelitian memperhatikan fenomena yang terjadi yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan kondisi objek penelitian yaitu mengamati tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam memberdayakan masyarakat Kota Batam melalui UPT Nilam Suri serta memperhatikan respon dari masyarakat, gelandangan dan pengemis di jalan dari kegiatan Dinas Sosial.

Wawancara merupakan proses mewawancarai beberapa orang yang berkaitan dengan objek penelitian dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Dinas Sosial Kota Batam dalam melakukan pembinaan dan masyarakat dengan tanggapannya dari pembinaan gelandangan. Dokumentasi merupakan proses mengumpulkan data-data untuk memperkuat pernyataan dari objek dan subjek penelitian secara tidak langsung, dokumentasi berupa foto dan bukti lainnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dari penelitian.

### Hasil Dan Pembahasan

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan organisasi kelembagaan perangkat daerah yang berperan strategis dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial (PMKS), pemberdayaan potensi sumber daya kesejahteraan sosial (PSKS) dan pemenuhan pemberdayaan masyarakat. (OPD) adalah satu. Kegiatan Departemen Sosial dan Kemasyarakatan yang memberikan pelayanan

secara terpadu dengan tujuan mengurangi masalah-masalah sosial, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang tidak mampu, dan meningkatkan PMKS. Peran dari Dinas Sosial serta dukungan dari masyarakat memainkan peran kunci dalam meningkatkan dukungan sosial, terutama untuk mengurangi banyaknya jumlah gelandangan dan pengemis dengan memperkuat komunitas dan sosialisasi dari masyarakat.

Dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas pemenuhan kebutuhan masing-masing keluarga. Dalam konteks penyaluran bantuan sosial, bantuan sosial diartikan sebagai syarat terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial suatu masyarakat agar dapat hidup yang selayaknya, berkembang, dan menjalankan fungsi sosialnya. meningkatkan.

Keberadaan sekretariat yang membidangi masalah sosial dan pengembangan masyarakat bukan berarti tidak ada masalah, sebaliknya semakin maju suatu daerah atau kota, maka semakin besar pula kemungkinan timbulnya masalah sosial. Pada tahun 2016, sekitar 26 orang penyandang masalah bantuan sosial (PMKS) miskin, menurut fakta yang dihimpun dengan bantuan Dinas Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat Kota Batam. 53.850 RTS/jiwa (41.768 RTS dan 12.082 orang), fakta ini digunakan sebagai dasar penawaran dan wajah. Persoalan ini membutuhkan peran dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan pemerintah daerah khususnya Kota Batam.

Dinas berkomitmen untuk berpartisipasi dalam penyelesaian masalah ini melalui rehabilitasi sosial, perlindungan, jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, penyalahgunaan dan pemberdayaan. Para gelandangan dan pengemis tersebut diberikan pemahaman oleh Dinas sosial dengan melakukan pendekatan secara humanis, Meskipun sempat ada penolakan namun setelah dilakukan pendekatan para gelandangan tersebut merasa nyaman. Setelah nyaman maka para gelandangan dan pengemis tersebut diberikan

pembinaan melalui UPT Nilam Suri tempat pembinaan Penyandang Disabilitas Penyandang Disabilitas Sosial (PMKS).

Suatu kebijakan dapat dinyatakan efektif apabila kebijakan berjalan baik dan mencapai hasil tujuan yang ditentukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator Menurut (Maulina, 2020) Pengukuran evaluasi kebijakan publik secara umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu:

1 Indikator input yaitu fokus pada penilaian kesesuaian pada penyediaan sumber daya pendukung seperti bahan-bahan dasar yang dibutuhkan Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk melaksanakan kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Batam. Indikator ini dapat meliputi penyediaan sumber daya manusia, pemberian materi, pemenuhan kebutuhan pokok dan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan di Dinas Sosial. Dinas Sosial dalam pemberdayaan Masyarakat mempunyai unit khusus terutama dalam pelaksanaan teknis dibidang pusat pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Nilam Suri (P2MKS). UPT Nilam Suri adalah tempat pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Namun UPT Nilam Suri tersebut masih di perlukan peningkatan penyediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan yang harus memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan oleh Dinas Sosial, kekurangan lainnya dalam pelaksanaan program rehabilitasi adalah pendanaan yang tidak memadai.

2 Indikator proses . Bentuk penilaian yang dilakukan dengan melihat cara menyampaikan dan mengsosialisasikan kebijakan seperti pemberian pelayanan secara langsung, memaksimalkan kepada masyarakat sehingga adanya kepuasan pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Bagian ini merupakan cara melihat efektivitas dan efisiensinya kebijakan yang ditetapkan seperti meningkatkan pelayanan.

Proses yang dilakukan oleh dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan

gelandangan dan pengemis melalui UPT Nilam Suri tempat pembinaan Penyandang Disabilitas Penyandang Disabilitas Sosial (PMKS). PMKS milik UPT Nilam Suri merupakan hasil sosialisasi dari dinas sosial, masyarakat dan anak-anak yang dilindungi undang-undang. UPT Nilam Suri disponsori langsung oleh Dinas Sosial dan berbagi anggaran yang sama dengan Dinas Dukungan Sosial dan Masyarakat Kota Batam. Adapun proses yang dilakukan berupa sosialisasi melalui radio Batam FM, media sosial, dialog asosiasi, bakti sosial, iklan dan kontak langsung dengan masyarakat. Reaksi masyarakat terhadap sosialisasi yang berlangsung sebenarnya sangat baik. Sosialisasi dilakukan agar masyarakat Kota Batam mengetahui adanya pembinaan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat. Namun sosialisasi ini terkendala anggaran yang masih minim.

### 3 Indikator Output

Fokus penilai terhadap hasil dari kegiatan program yang dilakukan oleh UPT Nilam Suri dalam mengurangi peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis melalui pembinaan dan seberapa banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dari kebijakan Dinas Sosial tentang penanganan gelandangan dan pengemis.

### 4 Indikator Dampak

Adanya perubahan-perubahan yang terjadi setelah adanya pelaksanaan program merupakan bagian dari dampak baik positif maupun negatif seperti adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah, dampak lain yaitu memungkinkan berkurangnya jumlah gelandangan di Kota Batam setelah adanya pelaksanaan program pembinaan.

Faktor yang menghambat evaluasi kebijakan Menurut Anderson (Anggara,2018.) Adapun faktor yang menghambat evaluasi kebijakan sebagai berikut :

1) Sumber Daya Yang Tidak Memadai

Sumber daya yang tidak memadai tentunya akan menghambat evaluasi kebijakan dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Batam. Saat ini sumber daya masih kurang. Selain itu, anggaran yang disediakan untuk kebijakan dinas sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis melalui pembinaan UPT Nilam Suri masih sangat minim dan menjadi keterbatasan bagi UPT Nilam Suri untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, UPT Nilam Suri dengan Sumber daya dan anggaran seadanya kegiatan pembinaan dilakukan terbatas. Meskipun begitu UPT Nilam Suri tetap berupaya menciptakan Kota Batam sebagai kota kawasan bebas gelandangan dan pengemis meskipun sumber daya dan anggaran menjadi penghambat evaluasi kebijakan Dinas Sosial tersebut.

## 2) Cara Implementasi Yang Tidak Tepat

Jika pengimplementasian suatu kebijakan tidak tepat maka berdampak tidak baik pada hasil kebijakan. Sejauh ini implementasi kebijakan dinas sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis sudah berjalan baik. Sosialisasi dilakukan bertujuan agar para gelandangan dan pengemis yang dibina di UPT Nilam Sari tidak hanya dalam pengawasan Dinas sosial namun masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam melakukan pengaduan ke dinas terkait gelandangan dan pengemis yang masih berkeliaran.

## 3) Timbulnya Masalah Baru

Pengimplementasian suatu kebijakan tentunya diharapkan adanya perubahan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Sejauh ini UPT Nilam Suri sudah melakukan pembinaan terhadap para gelandangan dan pengemis. Para gelandangan dan pengemis di berikan pembinaan melalui pendekatan yang membuat para gelandangan dan pengemis merasa nyaman sehingga bisa dibina di UPT Nilam Suri. Namun, sejauh ini para gelandangan dan pengemis yang setelah dibina tersebut menimbulkan kekawatiran bagi dinas sosial. Hal ini dikarenakan minimnya

SDM dan anggaran sehingga Dinas Sosial tidak bisa memantau para gelandangan dan pengemis setelah dibina sudah pulang ke kampung halaman atau kembali berkeliaran di jalanan. Tentunya ini akan menimbulkan masalah baru bagi dinas sosial

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan bahwa Evaluasi Kebijakan Dinas sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis melalui Pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Penyandang Masalah Sosial (P2MKS) yang dikenal dengan UPT Nilam Suri sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Hal ini dilihat dari evaluasi kebijakan menurut (Maulina, 2020) yaitu :

Indikator input, indikator proses, indikator output indikator dampak. sejauh ini tidak efektif karena kurangnya anggaran, jumlah ESDM atau kualifikasi ESDM, dan pengawasan program. Pelaksanaan kebijakan terbatas karena sumber daya dan anggaran yang masih minim. Adapun faktor penghambat evaluasi kebijakan Sumber daya yang tidak memadai. implementasi yang masih belum maksimal. Sejauh ini implementasi kebijakan dinas sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis sudah berjalan baik.

Sosialisasi dilakukan bertujuan agar para gelandangan dan pengemis yang dibina di UPT Nilam Suri tidak hanya dalam pengawasan Dinas sosial namun masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam melakukan pengaduan ke dinas terkait gelandangan dan pengemis yang masih berkeliaran. Timbulnya masalah baru sejauh ini para gelandangan dan pengemis yang setelah dibina tersebut menimbulkan kekawatiran bagi dinas sosial. Hal ini dikarenakan minimnya SDM dan anggaran sehingga Dinas Sosial tidak bisa memantau para gelandangan dan pengemis setelah dibina sudah pulang ke kampung halaman atau kembali

berkeliranan dijalankan. Tentunya ini akan menimbulkan masalah baru bagi dinas sosial

### Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, S. (N.D.). *Kebijakan Publik*.
- Bahagia. (2020). *Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh*.
- Hardini, H. K. (2013). . Public Service Quality And Building Coordinate Policy: An Analytical Study Of Jamkesmas And Jamkesda Implementation. *Journal Of Government And Politics Vol 4 No 2 August 2013*. Hal 278.
- Hayat. (2018). *Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, Dan Formulasi*.
- Jalizar, A. (2019). Peran Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Pada Tahun 2017-2019. *Lmupemerintahan, Issn 2746-*.
- Maulina, P. (2020). *Evaluasi Program Pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh*. Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
- Putra, Y. H. (2017). Perencanaan Tahapan Prioritas Strategi Berdasarkan Kebijakan Yang Ada Di Bagian Informatika Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Untuk Merealisasikan E-Government. *Jurnal Tata Kelola Dan Kerangka Kerja Teknologi Informasi*, 3(1).
- Samhana Risyah, A. (2022). *Pengaruh Pengembangan Karir, Budaya Organisasi Dan Kepemimpinan Transformasional Terhadap Keterikatan Karyawan Pada Pt. Bridon Bekaert*. Unsada.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, C).
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model*

*Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.

- Zamharira, C., & Arantika, D. P. (2018). Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Di Kota Banda Aceh. *Al-Ijtimai: International Journal Of Government And Social Science*, 4(1), 115–127.

## Implementasi Dan Dampak Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Serta Penanggulangan Sampah Plastik Dikota Batam

<sup>1</sup>Wilda Mukhalladun Waruwu <sup>2</sup>Etika Khairina

[pb191010038@upbatam.ac.id](mailto:pb191010038@upbatam.ac.id) [etika@puterabatam.ac.id](mailto:etika@puterabatam.ac.id)

<sup>1,2</sup> Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

email: [etika@puterabatam.ac.id](mailto:etika@puterabatam.ac.id)

### INFORMASI ARTIKEL

#### Sejarah Artikel

Diterima Redaksi: 26 Mei 2023

Revisi Akhir: 3 Juni 2023

Diterbitkan Online: 8 Juli 2023:

#### KEYWORDS :

*plastic waste , policy, implementation, society, government*

#### KORESPONDENSI

No HP: -

E-mail: [etika@puterabatam.ac.id](mailto:etika@puterabatam.ac.id)

### Abstracts

This study aims to describe the implementation of waste management policies by the Batam city government and waste management by establishing Regional Regulation No. 11 of 2013, as well as the impacts resulting from the implementation of plastic waste management and control policies in Batam city. The research method used is qualitative research method. Qualitative research is a research approach to study the state of natural objects based on post-positivist concepts, with the researcher as the main tool. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, documentation. Other supporting data are taken from journals, literature, websites, and previous research. The results of the study show that the implementation and impact of government policies in the management and management of plastic waste in the city of Batam has been maximally implemented by the city government of Batam in providing the facilities required for waste management, such as pick-up cars, TPA, TPS, AND trash cans. Meanwhile, judging from public awareness related to the policy of managing and handling plastic waste in Batam City, public awareness is still minimal, which can be seen from the household waste that is transported at the TPA, there is no separation of various types of waste. As for the impact of the implementation of plastic waste management and recycling policies in the city of Batam, if implemented by the community, it will have an impact on environmental hygiene, public health, increase performance, and reduce environmental damage.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah kota batam dan penggulungan sampah dengan menetapkan perda nomor 11 tahun 2013, serta dampak yang timbul akibat dari implementasi kebijakan pengelolaan dan penanggulangan sampah plastik di kota batam. Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian untuk mempelajari keadaan objek yang alamiah berdasarkan konsep post-positivis, dengan peneliti sebagai alat utamanya. Teknik pengumpulan data dialkukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Data pendukung lainnya diambil dari jurnal, kepustakaan, situs web, dan penelitian terdahulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dan dampak kebijakan pemerintah dalam pengelolaan serta penanggulangan sampah plastik dikota batam sudah di implemtasikan secara maksimal dilakukan pemerintah kota batam dilihat dari penyediaan fasilitas yang diputuskan dalam pengelolaan sampah, seperti penyediaan mobil pick up, tpa, tps, dan tong sampah. Sedangkan dilihat dari kesadaran masyarakat terkait dengan kebijakan pengelolaan dan penanggulangan sampah plastik di kota batam, kesadaran masyarakat masih minim yang dapat dilihat dari sampah rumah tangga yang di angkut di tpa belum adanya pemilahan berbagai jenis sampah. Adapun dampak dari implementasi kebijakan pengelolaan dan penggulungan sampah plastik di kota batam jika diterapkan oleh masyarakat akan berdampak pada kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, peningkatan perekonomian, dan mengurangi kerusakan lingkungan.



## Pendahuluan

Di era globalisasi ini berbagai permasalahan yang terjadi di beberapa negara berkembang. Salah satu diantaranya adalah negara Indonesia. Perkembangan yang terjadi di Indonesia saat ini ditandai dengan peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan pembangunan infrastruktur setiap daerah (Fonna, 2019). Hal tersebut menyebabkan munculnya masalah-masalah baru di negara berkembang terjadinya masalah perekonomian, budaya dan sosial. Permasalahan tersebut berdampak buruk pada kehidupan masyarakat seperti meningkatnya angka kemiskinan, kurangnya penyediaan pelayanan dan fasilitas umum karena belum meratanya pembangunan, dan permasalahan lingkungan (Gai et al., 2020).

Salah satu Daerah di Indonesia yang tingkat penduduknya semakin meningkat adalah Kota Batam dengan jumlah penduduk 1.196.396 jiwa berdasarkan pada Badan Pusat Statistika Kota Batam. Kepadatan tersebut menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya permasalahan kebersihan lingkungan masyarakat yaitu meningkatnya jumlah sampah. Jumlah sampah di Kota Batam saat ini mencapai 870 Ton/hari yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir. Jika peningkatan penduduk di Kota Batam terus meningkat maka akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah sampah yang berdampak buruk terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Permasalahan peningkatan jumlah sampah di Kota Batam tersebut sangat diperlukan kebijakan yang tepat dari pemerintah untuk memberikan himbauan kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah masing-masing (Tambunan et al., 2021).

Merujuk pada Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menjelaskan bahwa dalam mengurangi peningkatan jumlah sampah sangat diperlukan kerja sama, peran aktif dari masyarakat dan pemerintah dengan menetapkan kebijakan bersama dan ikut berpartisipasi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut yaitu pengelolaan sampah di daerahnya (Ambina, n.d.).

Dalam menangani permasalahan jumlah sampah pemerintah Daerah Kota Batam menetapkan kebijakan tentang pengelolaan sampah yang dimuatkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2013. Dalam Peraturan Daerah tersebut tertulis bahwa masyarakat mempunyai hak, kewajiban, dan peran penting dalam pengelolaan sampah terutama pada bagian pengurangan, pemilahan, dan menjaga kebersihan lingkungan. Peran masyarakat dapat diartikan bahwa keikutsertaan individu dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi masing-masing (Margayaningsih, 2018).

Dalam Perda No 11 Tahun 2013 Kota Batam menjelaskan tentang pengelolaan sampah dan konsep pengelolaan sampah. Saat ini konsep pengelolaan sampah yang dilakukan di Kota Batam adalah *Zero Waste* menggunakan prinsip 3 R (*reduce, reuse, recycle*). Tujuan dari konsep 3R untuk memudahkan pemilahan jenis sampah yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Selain itu untuk meningkatkan pengelolaan dan pemilahan sampah terutama sampah plastik yang tidak mudah terurai, pemerintah Kota Batam menyediakan fasilitas di lingkungan masyarakat seperti mengadakan program Bank sampah, melakukan Pelatihan-Implementasi Dan Dampak Kebijakan Pemerintah 40

pelatihan pengelolaan sampah, Pengomposan sampah dan mendirikan bank sampah tingkat RT/RW.

Bank sampah merupakan tempat penabungan sampah berjenis plastik, kertas dan logam yang memiliki nilai jual yang dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat dan juga mengurangi penumpukan sampah berjenis jenis plastik, kertas dan logam. Sampah Plastik merupakan sampah yang tidak mudah lapuk dalam waktu cepat yang membutuhkan proses bertahun-tahun untuk terurai. Seperti Penelitian dahulu yang (Rahmayani & Aminah, 2021), tentang efektivitas pengendalian sampah sampah menyampaikan bahwa sampah plastik adalah sampah non organik yang sulit terurai, beracun, dan mudah mencemari lingkungan untuk itu di perlukan pengelolaan sampah plastik berwawasn lingkungan.

Seperti halnya yang di jelaskan oleh (Septiani et al., 2019) dalam penelitiannya Tentang Pengelolaan Sampah Plastik di Salatiga dalam penelitannya menjelaskan bahwa dalam pengelolaan sampah melibatkan empat pihak yaitu Pemerintah, masyarakat penghasil sampah ruamh tangga, pemulung sebagi agen pemilah sampah, dan Bank sampah.

Dari penjelasan latar belakang dan penelitian terdahulu diatas tentang kebijakan pengelolaan sampah plastik, untuk itu peneliti tertarik untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang Implementasi dan Dampak Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Serta Penanggulangan Sampah Plastik Di Kota Batm

## Kajian Teori

### 1. Kebijakan dan implementasi kebijakan

kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun pemerintah di lingkungan mereka berada dengan mnyampaikan berbagai kendala-kendala yang dihadapi dan menetapkan kesepakatan secara bersama untuk melaksanakan mencapai tujuan dari kebijakan (Syafaruddin et

al., 2020). Sedangkan menurut (Nur & Guntur, 2019) menjelaskan bahwa kebijakan adalah sebuah stategi yang disusun oleh pemerintah untuk mengarahkan pelaksanaan kebijakan.

Sedangkan menurut (Yuliah, 2020) Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan setelah ditetapkan dan dirumuskannya kebijakan yang didukung oleh sarana dan prasana untuk mencapai sasaran dari tujuan yang telah di tetapkan, implementasi kebijakan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat.

### 2. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah proses yang dilakukan dalam menandai sampah melalui kumpul, angkat, dan buang di tempat pembuangan sampah. proses pengelolaan sampah yang dilakukan dapat melalui kegiatan *Zero Waste* yang dilakukan secara bertahap, dan berkelanjutan. Untuk meningkatkan implemntasi kebijakn pengelolaan sampah (Salsabila, 2020)

Solusi dalam pengelolaan sampah dapat melalui program bank sampah yang dapat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, memberikan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, sehingga dapat menumbuhkan kembangkan kesadaran masyarakat yang dapat memberikan manfaat ekonomi, kesehata, lingkungan yang hijau, bersih dan nyaman (Athailah et al., 2021)

### Metode Analisis

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017) yaitu menyatakan bahwa peneliti adalah yang paling utama dalam penelitian kualitatif, dan metode pengumpulan data meliputi triangulasi (gabungan), analisis data induktif/kualitatif, dan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian untuk mempelajari keadaan objek yang alamiah berdasarkan konsep post-positivis, dengan peneliti sebagai alat utamanya. Alih-alih menggeneralisasi, kita harus fokus pada makna. Tujuan peneliti adalah **Implementasi Dan Dampak Kebijakan Pemerintah** 41

<sup>1</sup>Wilda Mukhalladun Waruwu <sup>2</sup>Etika Khairina

melakukan penelitian kualitatif yang menelaah pertanyaan-pertanyaan yang masih samar-samar dengan maksud untuk menggali lebih dalam tentang keadaan yang terjadi di lapangan sehingga data dan fakta dapat diperoleh.

#### 1. Sumber Data

Untuk penelitian ini sumber data yang di peroleh berdasarkan pada (Sugiyono, 2017) :

- 1) Data Primer merupakan data yang dikumpulkan dan didapatkan langsung oleh peneliti dengan melakukan wawancara dari pihak yang telah ditentukan terlebih dahulu yang berkaitan tentang permasalahan yang diteliti. Sedangkan yang menjadi sumber data primer di peroleh dari wawancara kepala masyarakat dan Dnisa lingkungan Hidup.
- 2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung didapat dari sumbernya. Data sekunder di peroleh peneliti melalui penelitian terdahulu, buku-buku, jurnal, media cetak, website Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.

#### 2. Metode Analisis Data

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017) menjelaskan bahwa ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menganalisis data .

##### 1) Reduksi data

Peneliti mengumpulkan ringkasan dari data-data, inti masalah dan kebenaran informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian. Mendatangi secara langsung Dinas Lingkungan Hidup bagian dari tindakan yang dilakukan oleh peneliti untuk mudah memperoleh data. Tujuan dari penyajian data yaitu untuk melihat tingkat pemahaman dari peneliti dalam memahami data yang diperoleh.

##### 2) Penarikan kesimpulan

Masalah baru yang tidak pernah ada sebelumnya dan dibuktikan kebenaran, relevansi dengan mendeskripsikan objek permasalahan yang pada awalnya tidak adanya kepastian penyebab timbulnya permasalahan, kemudian di temukan kebenaran yang menimbulkan adanya interaksi-intraksi, hipotesis, dan memungkinnya terbentuknya teori baru setelah dilakukan penelitian Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017).

#### 1. Metode pengumpulan data

##### a. Observasi

Observasi adalah proses mengamati objek penelitian yang di lakukan oleh peneliti dengan memperhatikan langsung fenomena yang terjadi di lapangan dan mencatat hasil dari pengamatan yang dilakukan. Pada penelitian ini, yang dilakukan peneliti pada peneliti memperhatikan fenomena yang terjadi yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan kondisi objek penelitian yaitu memperhatikan proses pengelolaan sampah melalui pilhan dan pengangkutan sampah serta memperhatikan respon dari masyarakat terkait kebijakan pengelolaan sampah

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan proses mewawancarai beberapa orang yang berkaitan dengan objek peneliti dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dalam melakukan pembinaan dan masyarakat dengan tanggapannya dari ketetapan kebijakan.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses mengumpulkan data-data untuk memperkuat pernyataan dari objek dan subjek penelitian secara tidak langsung, dokumentasi berupa foto dan bukti lainnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dari penelitian. .

## Hasil Dan Pembahasan

Implementasi dari kebijakan publik yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi atau pengelolaan sampah plastik di Kota Batam menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013. Namun dukungan masyarakat dari permasalahan sampah sangat di butuhkan oleh pemerintah. Kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat adalah hal utama dalam memilih dan memilah sampah baik organik maupun anorganik sehingga dapat memudahkan para petugas lingkungan dalam pengakutan sampah (Siswati et al., 2022)

### 1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

#### a. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan sangat mempengaruhi kesadaran masyarakat. Pada saat ini kebanyakan masyarakat hanya mengenal tempat pembuangan sampah yang dijadikan satu, sehingga menumpuknya berbagai jenis sampah. tentu ini menyebabkan meningkatnya pencemaran lingkungan. Penumpukan pembuangan satu jenis temoat sampah sampai sekang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Sedangkan pada Perda Kota Batam telah menetapkan kebijakan bahwa masyarakat sebagai penghasil sampah diberikan tanggung jawab untuk mengelola sampah sendiri. Sedangkan tanggung jawab dari pemerintah yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Namun dilihat dari implemtasinya kebijakan Perda ternyata kesadaran masyarakat masih minim.

#### b. Sumber Daya

Sumberdaya yang dimaksud yaitu dukungan dari pemerintah dalam mengedukasi tentang pengelolaan sampah baik itu sumberdaya manusia ataupun sumberdaya alam terkait dengan pemilaha sampah berjenis plastik.

#### c. Hubungan Organisasi

Adanya organisasi yang dibentuk masyarakat merupakan salah satu dari respon masyarakat dan awal dari kesadaran masyarakat tentang pemilah jenis sampah rumah tangga contohnya pembentukan program masyarakat yang dikoordinasikan oleh RT/RW setempat dengan DLH untuk mencapai tujuan.

### 2. Pengelolaan Sampah dan Penanggulangan

Pengelolaan sampah dan penanggulangan sampah dilakuakandengan penerapan zero waste. Ada tiga tahapan dalam pengeloalan sampah melalui zero waste atau 3R yaitu Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), dan Recycle (mendaur ulang). Penggunaan konsep ini juga telah di tetapkan dalam undang-undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. aktivitas yang dapat dilakukan adalah dengan mengatasi produksi sampah, pendaur ulang sampah, dan penggunaan kembali. Jika zero waste ini dapat dijalankan semaksimal mungkin akan meberikan dampak bagi masyarakat yaitu meningkatkan kebersihan lingkungan, meningkatkan kesehatan, dan kepedulian lingkungan.

Adanya faktor penghambat ini mengakibatkan tidak tidak maksimalnya implementasi pengelolaan sampah tersebut ada beberapa faktor penghambat sebagai berikut:

- a. Kurangnya kesadaran, pemahaman, dan partisipasi masyarakat menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang proses pemilahn jenis sampah
- b. Sarana dan Prasarana menjadi pendukung utama dalam pengelolaan sampah mobil pengakutan yang dibutuhkan pada pengakutan sampah untuk pembungan di TPA/TPU.

Terkait adanya faktor penghambat dari pengelolaan sampah juga terjadi adanya dampak atau konsekuensi yang dari hal tersebut seperti hal berikut:

Sampah plastik dapat merusak ekosistem terlihat dari adanya perubahan pada sungai yang dipenuhi limbah industri maupun rumah tangga, serta hilangnya hewan-hewan di danau, sungai. Sampah plastik sulit terurai. Sampah plastik hanya mampu di daur ulang 20% sedangkan sampah plastik membutuhkan 60 tahun sampai benar-benar bisa terurai dengan sendirinya. Dari beberapa Sampah plastik sendiri dapat dikurangi dengan proses 3R (Reuse, Reduce, Recycle) sesuai dengan penjelasan di atas.

Sampah Plastik Jadi Masalah Global Tidak hanya itu sampah plastik juga menjadi permasalahan global yang dimana material dari bahan plastik sulit diuraikan, Dengan waktu urai yang lama faktanya proses atau jumlah produksi dari material bahan plastik tersebut tidak berkurang sama sekali dan bahkan menjadi gaya hidup perkotaan yang tidak lepas untuk menggunakan benda berbahan plastik.

Dari beberapa penjelasan diatas , dengan berbagai permasalahan yang terjadi pada penerapan implementasi dan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan serta penanggulangan sampah plastik di kota batam yaitu dengan zero waste dan 3R. dari pemerintahan yang menjadi faktor pemngahambat dari pengelolaan sampaha adalah biaya untuk mendukung kebijakan pemerintah serta program yang diusulkan oleh masyarakat.

Ada beberapa implikasi masukan kebijakan yakni :

1. Belum adanya suatu Peraturan turunan untuk Peraturan Presiden No 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
2. Organisasi Pelaksana yakni Unit Bank Sampah dan TPS3R jumlahnya masih sedikit dan sangat lemah kekuatannya.
3. Sumberdaya, jumlah mobil angkutan perlu ditambah karena pada dasarnya tidak cukup bila hanya menggunakan satu mobil pick up saja, sampah perlu

adanya pemilihan diantara pada sampah yang organik serta yang non organik, yang dimana sampah plastik merupakan contoh sampah yang sangat sult di uraikan.

4. Proses pemilahan sampah yang dimana sumber sampah masih menggunakan satu jenis tempat sampah
5. Frekuensi, Petugas pengangkut sampah ke Bank Sampah sudah sesuai dengan SOP namun karena kurangnya sarana dan prasarana seperti mobil pick up angkutan sampah jumlahnya terbatas pengangkutan dibuatkan penjadwalan dan dengan tonase yang sudah ditentukan dan relatif cukup lama.
6. Terkait pengurangan sampah sudah di lakukan di 12 kecamatan di Kota Batam namun tetap saja jumlahnya masih kurang;
7. Masih belum tersedianya fasilitas dari hulu, yang dimana kurangnya sosialisasi, dan peraturan turunan di tingkat daerah yang belum Disini, ada juga yang menjadi kendala implementasi pengurangan sampah ini.
8. Ketepatan Layanan, pelayanan pengurangan sampah dirasa sangat tepat untuk dilaksanakan dan juga sangat baik dikarena sangat vital perannya untuk masyarakat agar meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah agar lebih teratur dan benar tidak membuang sampah sembarangan.
9. Kegiatan implementasi dan dampak kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah plastik di Kota Batam sudah ada akan tetapi masih lemah dan sulit terealisasi baik itu dari biaya berjalannya suatu program tersebut atau dari masyarakat juga yang kurangnya partisipasi dalam menjaga lingkungannya.
10. Kurangnya kesadaran diri masyarakat juga dapat menimbulkan hubungan sosial dan lingkungan yang tidak baik,

<sup>1</sup>Wilda Mukhalladun Waruwu <sup>2</sup> Etika Khairina

tercemarnya lingkungan dan menimbulkan banyak penyakit di sekitar kita.

### Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kota batam ini menetapkan suatu kebijakan, yang dimana kebijakan, kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dimana keputusan tersebut telah menyangkut pada suatu kepentingan publik ang telah dilakukan oleh pemerintah serta juga dapat melibatkan pada suatu pihak lainnya. Namun tidak hanya dari kebjakan pubik saja, melainkan ada juga

Implementasi kebijakan yang dapat disebut juga policy implementation. Dimana implementasi kebijakan itu merupakan suatu pelaksanaan yang dikendalikan oleh aksi-aksi suatu kebijakan dalam suatu rentang dan waktu tertentu disini, implementasi dari suatu kebijakan publik yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menanggulangi serta pengelolaan pada suatu sampah plastik.

Dikota batam, telah di tetapkannya kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sampah. terkait kebiajkan tersebut masih belum maksimal dalam penerapan dan penerapannya dilingkungan masyarakat.

#### Kurangnya

Minimnya kesadaran pada diri masyarakat tentang pembuangan sampah pada tempatnya dan pemahaman terhadap pemilahan sampah organik dan anorganik. Perlu diketahui masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarang dan hal ini terus dilakukan oleh masyarakat apabila tidak adanya perhatian dari petugas kebersihan yang di tugaskan.

Sedangkan tentang kebijakan pemerintah tentang pengelolan sampah masih belum berjalan maksimal. Kemudian dari penyediaan fasilitas dari pemerintah sudah mulai maksimal. Sampai sekarang ini pemerintah terus mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk

memberikan pemahaman terkait dengan TP3R terus dilakukan.

Sedangkan untuk pengelolaan sampah plastik berdasarkan pada peraturan pemerintah Kota Batam Belum berjalan maksimal pengelolaan di sebabkan dari kesadaran dan partisipasi masyarakat setempat. Untuk itu dapat simpulkan bahwa pemerintah Kota Batam seharusnya tidak hanya berfokus dalam penetapan pengelolaan sampah tetapi lebih memfokuskan pada implementasi kebijakan di lingkungan masyarakat apakah telah sesuai dengan kebijakan dan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

<sup>1</sup>Wilda Mukhalladun Waruwu <sup>2</sup>Etika Khairina

### Daftar Pustaka

- Ambina, D. G. (N.D.). *Tinjauan Pemilahan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah A Review Of Sorting Waste According To Law No 18 Of 2008 On Waste Management*.
- Athaillah, A., Numairi, A. S., As-Shidqi, M. H., Basit, K. A., & Wahyuni, I. R. (2021). Membangun Jaringan Bank Sampah Sebagai Solusi Penanganan Sampah Serta Menumbuhkan Sirkular Ekonomi Masyarakat Desa Hantakan. *Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, 1(28), 54–65.
- Fonna, N. (2019). *Pengembangan Revolusi Industri 4.0 Dalam Berbagai Bidang*. Guepedia.
- Gai, A. M., Witjaksono, A., & Maulida, R. R. (2020). *Perencanaan Dan Pengembangan Desa*. Dream Litera Buana.
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa. *Jurnal Publiciana*, 11(1), 72–88.
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. *Makassar: Publisher Unm*.
- Rahmayani, C. A., & Aminah, A. (2021). Efektivitas Pengendalian Sampah Plastik Untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup Di Kota Semarang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 18–33.
- Salsabila, L. (2020). Analisa Efektifitas Bank Sampah Sebagai Alternatif Pengelolaan Sampah Dalam Mencapai Smart City Di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 21–29.
- Septiani, B. A., Arianie, D. M., Risman, V., Handayani, W., & Kawuryan, I. S. S. (2019). Pengelolaan Sampah Plastik Di Salatiga: Praktik Dan Tantangan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(1), 90–99.
- Siswati, L., Eterudin, H., Setiawan, D., Ratnaningsih, A. T., & Yandra, A. (2022). Penyadaran Kepada Ibu Rumah Tangga Dalam Pemisahan Sampah Organik Dan Anorganik Rumah Tangga Di Kecamatan Minas. *Diklat Review: Jurnal Manajemen*
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, C).
- Syafaruddin, S., Napitupulu, D. S., & Harahap, A. S. (2020). Komunikasi Interpersonal Kepala Sekolah Dalam Pengambilan Keputusan Dan Peningkatan Mutu Di Sma Al-Ulum Kota Medan. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(01), 227–238.
- Tambunan, S. W. S., Prastya, I. Y., & Kurnianingsih, F. (2021). Implementasi Kebijakan Pembatasan Plastik (Studi Kasus Kelurahan Sungai Langkai, Di Kota Batam). *Student Online Journal (Soj) Umrah-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1), 489–496.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129–153.